



# LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA**

# 2020



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

# **LAPORAN KINERJA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN BAHASA**

# **2020**

---

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPP Bahasa tahun 2020. BPP Bahasa pada tahun 2020 menetapkan lima Sasaran Program (SP) dan delapan Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum, BPP Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang.

Permasalahan tersebut di antaranya: (1) pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti penyuluhan, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, tes UKBI dan lainnya dibatasi aktivitas bersemuka (tatap muka); (2) 30 UPT di daerah yang menjadi garda depan Kemendikbud dan langsung bermitra dengan pemangku kepentingan di daerah sudah saatnya diperkuat status kelembagaannya; dan (3) Penguatan regulasi implentasi Permendikbud 70 tahun 2016 agar semua jenjang pendidikan dapat teruji kemahiran berbahasanya; dan (4) Sinkronisasi program antarunit di Kemendikbud merupakan keniscayaan yang dapat dilakukan bersama melalui dua pintu utama: pendidikan dan kebudayaan.



Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini, gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPP Bahasa pada tahun 2020 dapat terlihat. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPP Bahasa pada tahun 2020.

Jakarta,      Februari 2021  
Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,



**Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis/Permasalahan .....	5
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA .....</b>	 <b>10</b>
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA .....</b>	 <b>13</b>
A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	13
B. Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....	48
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Pengukuran Kinerja	
3. Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan	
4. Surat Pernyataan telah Direviu	
5. Lembar Reviu Laporan Kinerja	
6. Nilai Setiap Variabel Kinerja Anggaran Satker	
7. Nilai Setiap Variabel pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker	
8. Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	



# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tabel 3	Target dan Realisasi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji
Tabel 4	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji
Tabel 5	Target dan Realisasi IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Tabel 6	Tingkat Keterkendalian Kabupaten/Kota yang Telah Divalidasi
Tabel 7	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Tabel 8	Judul Buku yang Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia
Tabel 9	Judul Buku Pengayaan Literasi Tahun 2020
Tabel 10	Judul Buku Komik Tahun 2020
Tabel 11	Target dan Realisasi IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
Tabel 12	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
Tabel 13	Target dan Realisasi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah
Tabel 14	Kajian Vitalitas Bahasa Daerah dan Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah
Tabel 15	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah
Tabel 16	Target dan Realisasi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia
Tabel 17	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia
Tabel 18	Target dan Realisasi IKP Jumlah Pemelajar BIPA
Tabel 19	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Pemelajar BIPA
Tabel 20	Target dan Realisasi Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB
Tabel 21	Rincian Nilai Per Komponen dan Catatan Rekomendasi
Tabel 22	Target dan Realisasi Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM
Tabel 23	Sandingan Pagu dan Realisasi Per Belanja
Tabel 24	Komponen Pengungkit, Komponen Hasil, dan Bobot Penilaian
Tabel 25	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM
Tabel 26	Pagu, Realisasi, dan Sisa Anggaran Per Belanja
Tabel 27	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satker Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020



- Tabel 28 Pagu dan Realisasi Anggaran Per *Output* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020
- Tabel 29 Pagu dan Realisasi Per Sasaran Program
- Tabel 30 Pagu dan Realisasi Per Indikator Kinerja Program
- Tabel 31 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
- Tabel 32 Prioritas Nasional
- Tabel 33 77 Bahasa Daerah yang Digunakan dalam Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M

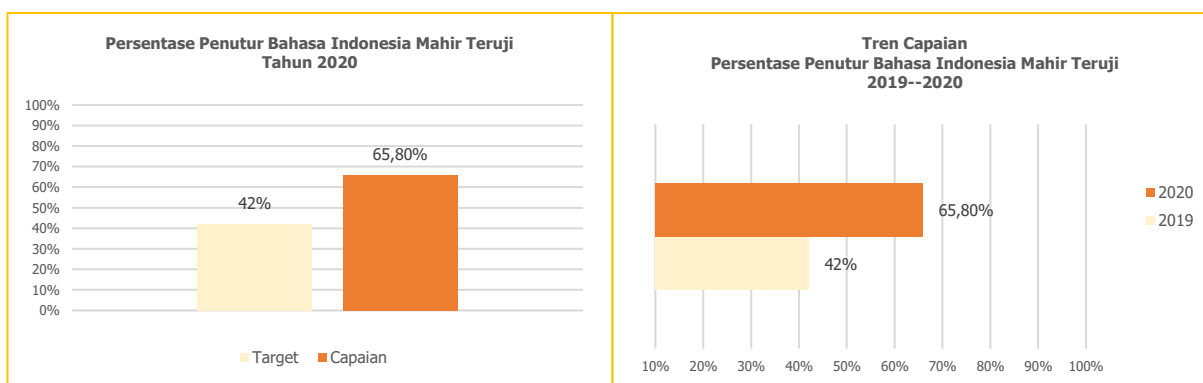


# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian lima sasaran program (SP) dengan delapan indikator kinerja program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

## Sasaran Program 1: Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia, Indikator Kinerja Program 1.1: Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
					Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	42%	42%	65,80%	156,67%	50%

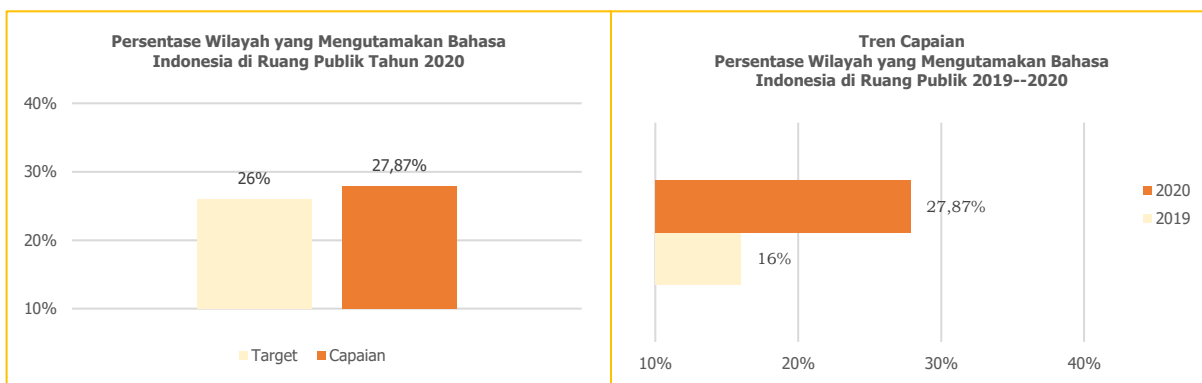


Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Kesulitan pelaksanaan UKBI berbasis kertas di masa pandemi Covid-19	1. Melakukan tes UKBI jarak jauh.	Melakukan UKBI jarak jauh dengan menggunakan aplikasi UKBI Dinamis yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
	2. Melaksanakan UKBI tatap muka (berbasis kertas) sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.	Mengalihwahanakan buku kiat-kiat kemahiran berbahasa dalam bentuk aplikasi.
2. Sosialisasi UKBI yang dilakukan secara tatap muka terhambat karena pandemi Covid-19	Sosialisasi Kiat-Kiat Kemahiran Berbahasa Indonesia.	Sosialisasi Kiat-Kiat Kemahiran Berbahasa Indonesia.



## Indikator Kinerja Program 1.2: Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.2 Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	16%	26%	27,87%	107,19%	65%

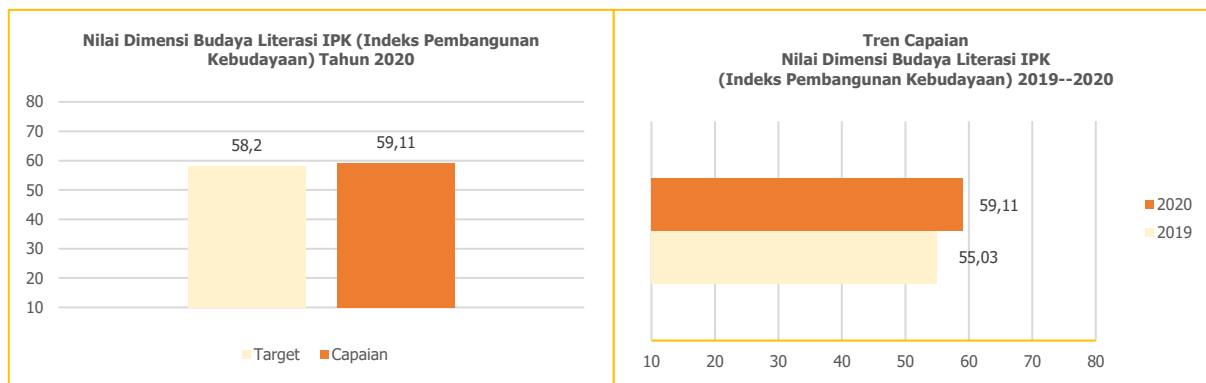


Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Masa pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan antarwilayah menimbulkan kesulitan untuk melakukan pengambilan data di ruang publik.	Pelaksana kegiatan melakukan Konsinyasi Daring Verifikasi dan Pengolahan Data Pantauan Pengendalian Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik melalui aplikasi Zoom.	Pelaksana kegiatan menggunakan aplikasi peta keterkendalian untuk mempermudah pemantauan.
2. Banyak lembaga/badan publik yang ditutup pada masa pandemi.	Pelaksana kegiatan melakukan koordinasi melalui grup Tim Pemantauan.	Pelaksana kegiatan melakukan koordinasi melalui grup Tim Pemantauan.

## Sasaran Program 2: Meningkatkan Budaya Literasi, Indikator Kinerja Program 2.1: Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
2	Meningkatnya Budaya Literasi	2.1 IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	55,03	58,2	59.11	100.74	71,04

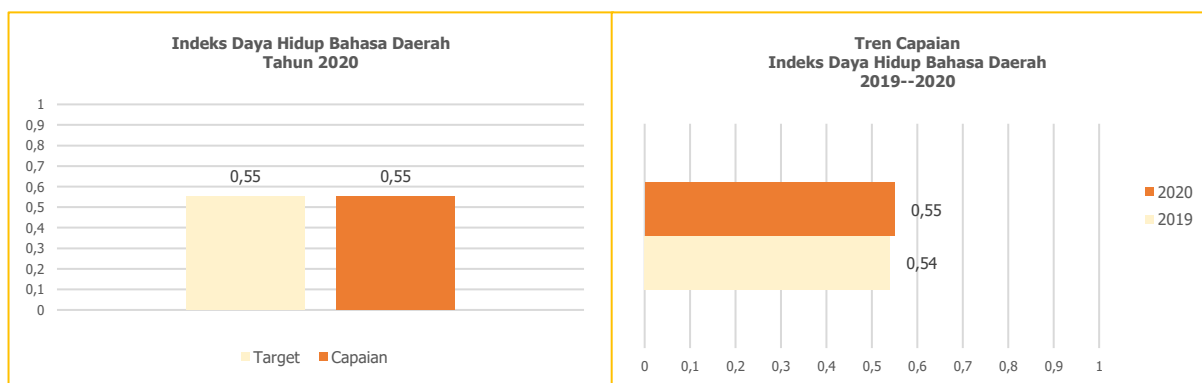




Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat kondisi pandemi Covid-19	Metode pelaksanaan kegiatan dengan sistem kerja pada masa pandemi Covid-19	Mengoptimalkan media daring dalam pelaksanaan pertemuan penulis.
2. perbedaan interpretasi pekomi terhadap skenario	Mengadakan diskusi dan observasi daring yang intensif dengan para penulis.	Mengadakan diskusi dan observasi daring yang intensif dengan para penulis.
3. Tidak semua penerbit yang mendaftar seleksi sudah memiliki hak terjemahan dengan penerbit luar negeri		

### Sasaran Program 3: Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah, Indikator Kinerja Program 3.1: Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
					Target	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	0,54	0,55	0,55	100	0,59

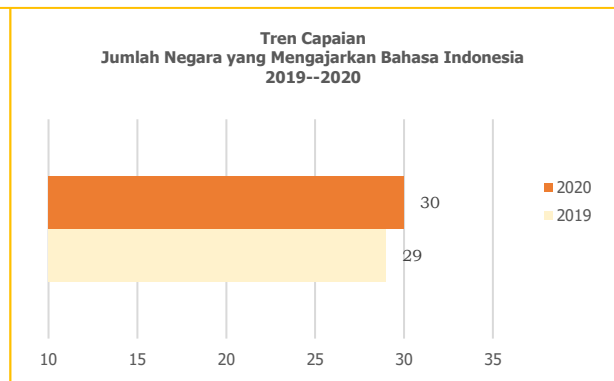
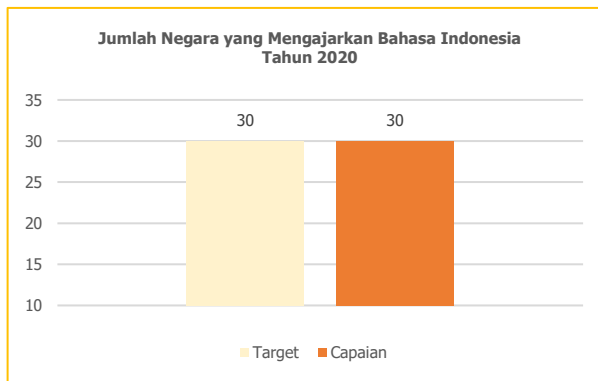


Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
<p>1. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan kajian vitalitas sulit dilaksanakan secara tatap muka, padahal kegiatan kajian vitalitas harus dilakukan secara tatap muka. Wawancara dan penggalian data kajian vitalitas tidak dapat dilakukan secara daring. Hal ini disebabkan kajian vitalitas bahasa harus melibatkan penutur jati bahasa daerah yang sebagian besar tidak melek teknologi. Hal lain adalah keadaan masyarakat penutur bahasa daerah yang dipilih biasanya berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan diakses, baik transportasi maupun jaringan internet. Kategori bahasa yang dikaji merupakan bahasa daerah yang berkategori terancam punah dan kritis yang letaknya biasanya jauh dari perkotaan.</p> <p>Sebagian besar metode perlindungan bahasa dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan mencari dan mendatangi informan. Pembatasan mobilitas dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan wawancara langsung tidak mungkin untuk dilakukan. Untuk melaksanakan secara jarak jauh (daring) pun, calon informan dikhawatirkan belum paham penggunaan teknologi. Meskipun informan paham penggunaan teknologi, proses menggali informasi yang dilakukan secara daring, yang pelaksanaannya tergolong lama, dikhawatirkan akan membuat informan merasa jenuh dan lelah.</p>	<p>1. Kajian vitalitas bahasa daerah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah yang tersebar di ibu kota provinsi. Beberapa UPT mengerjakan kajian vitalitas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, penentuan nilai rerata indeks vitalitas bahasa diperoleh dari kajian yang dilakukan oleh beberapa UPT pada tahun 2020.</p> <p>2. Beberapa inovasi dilakukan dalam rangka program perlindungan bahasa daerah, yaitu. Dalam penyusunan jurnal edisi khusus, tim teknis perlindungan bahasa bekerja sama dengan tim Jurnal "Ranah". Penerbitan jurnal edisi khusus ini bertujuan untuk mendukung pencapaian penyusunan dokumen kebahasaan, khususnya dalam konteks perlindungan bahasa.</p>	<p>Kajian vitalitas bahasa daerah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT).</p> <p>Penyusunan jurnal edisi khusus tahun 2020 dan diseminasi hasil perlindungan bahasa melalui kegiatan Seri Diskusi Daring (SDD) Pelindungan Bahasa</p>
<p>2. Kurang optimalnya koordinasi antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah.</p>	<p>Menguatkan koordinasi melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pelindungan Bahasa dan Sastra.</p>	<p>Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pelindungan Bahasa dan Sastra melibatkan pusat dan daerah.</p>



**Sasaran Program 4: Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di  
Kancah Internasional, Indikator Kinerja Program 4.1: Jumlah  
Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
					Target	Realisasi	%	
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	29	30	30	100	34



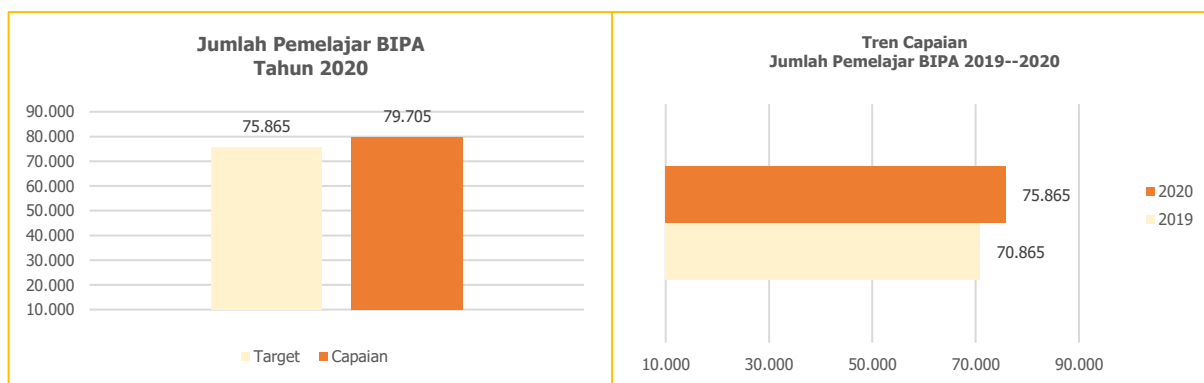
Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ini. Sejak Maret 2020, pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia dihentikan untuk sementara, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan perjalanan dinas luar negeri. Penghentian ini dapat berpengaruh terhadap jumlah negara yang mendapatkan fasilitasi program BIPA.	Mengubah skema penugasan tenaga pengajar dari Indonesia dalam bentuk (a) pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA secara daring, baik dengan melibatkan pengajar dari Indonesia maupun pengajar lokal setempat; (b) mengoptimalkan kemitraan pengajaran BIPA melalui penugasan tenaga pengajar lokal, antara lain diaspora yang berdomisili di negara sasaran, warga negara asing alumni penerima beasiswa program pemerintah Republik Indonesia, seperti Darmasiswa, Kemitraan Negara Berkembang, dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dll., serta mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di luar negeri. Para duta bahasa negara ini diseleksi melalui mekanisme rekrutmen khusus guna menjamin mutu kompetensi dalam pengajaran BIPA. Dengan strategi ini, target IKP jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Mengubah skema penugasan tenaga pengajar dari Indonesia dalam bentuk (a) pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA secara daring, baik dengan melibatkan pengajar dari Indonesia maupun pengajar lokal setempat; (b) mengoptimalkan kemitraan pengajaran BIPA melalui penugasan tenaga pengajar lokal, antara lain diaspora yang berdomisili di negara sasaran, warga negara asing alumni penerima beasiswa program pemerintah Republik Indonesia, seperti Darmasiswa, Kemitraan Negara Berkembang, dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dll., serta mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di luar negeri. Para duta bahasa negara ini diseleksi melalui mekanisme rekrutmen khusus guna menjamin mutu kompetensi dalam pengajaran BIPA.



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
	tetap dapat tercapai meskipun pandemi Covid-19 masih mewabah.	
2. Adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebabkan salah satu unit eselon dua, yaitu Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) yang selama ini menangani kegiatan terkait ke-BIPA-an dilebur dengan unit eselon dua lain di lingkungan BPP Bahasa, yakni Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.	Melakukan koordinasi dengan berbagi pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.	Melakukan koordinasi dengan berbagi pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.
3. Terdapat beberapa Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang belum mendapatkan informasi tentang program BIPA.	Melaksanakan sosialisasi tentang program BIPA kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Melaksanakan sosialisasi tentang program BIPA kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

### Indikator Kinerja Program 4.2: Jumlah Pemelajar BIPA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
4	Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.2 Jumlah Pemelajar BIPA	70.865	75.865	79.705	105,06	95.865



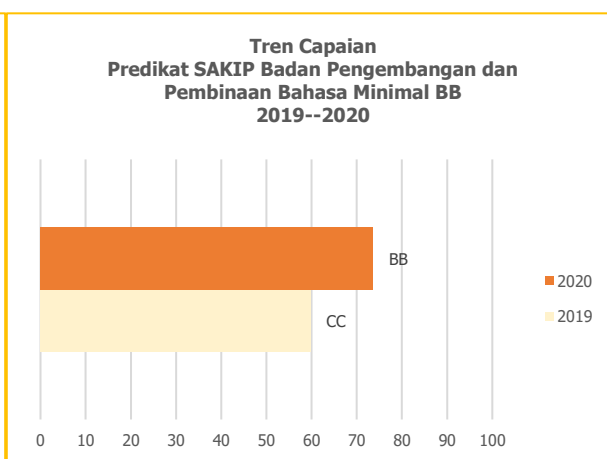
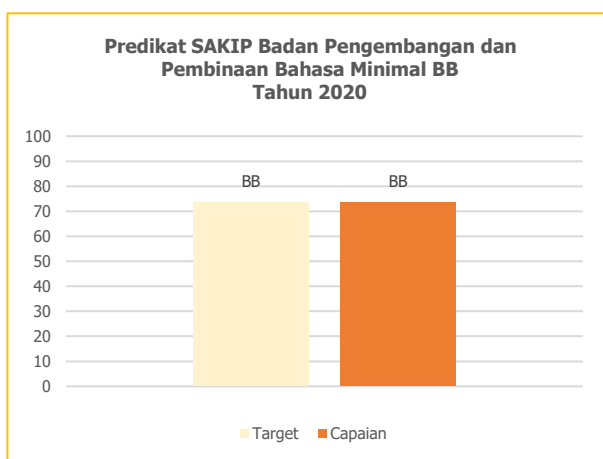
Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ini. Salah satu akibatnya yaitu penghentian sementara kegiatan tatap muka di lembaga penyelenggara program BIPA.	Mengubah skema pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) BIPA secara daring dan mengoptimalkan penugasan tenaga pengajar lokal, yakni diaspora dan warga negara yang memiliki	Mengubah skema pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) BIPA secara daring dan mengoptimalkan penugasan tenaga pengajar lokal, yakni diaspora dan warga negara yang memiliki



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
	kompetensi dalam pengajaran BIPA yang berdomisili di negara sasaran, serta warga negara asing (alumni) penerima beasiswa pemerintah RI.	kompetensi dalam pengajaran BIPA yang berdomisili di negara sasaran, serta warga negara asing (alumni) penerima beasiswa pemerintah RI.
2. Adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan unit eselon dua yang selama ini menangani program BIPA, yakni Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dilebur dengan unit eselon dua lain di BPP Bahasa, yakni Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Hal ini dapat berpengaruh pada tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan.	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.

**Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas,  
Indikator Kinerja Program 5.1: Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB**

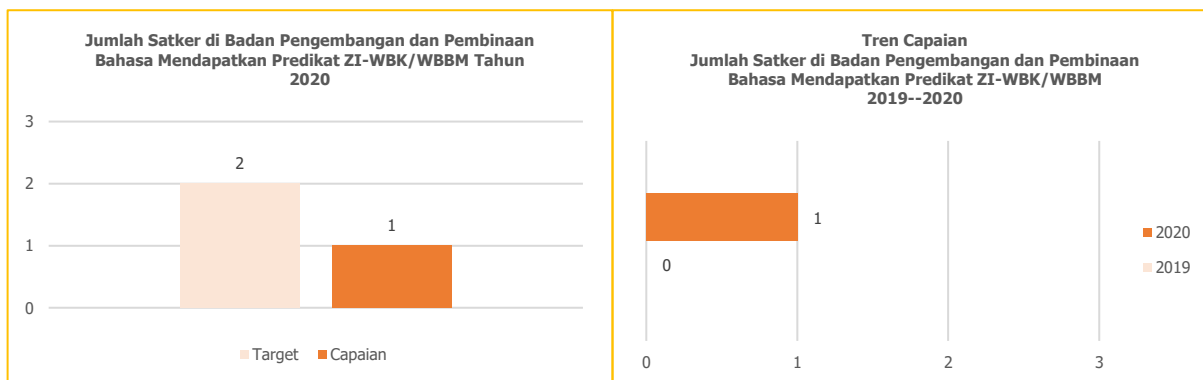
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	CC	BB	BB	100	BB



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengimplementasikan SAKIP.	1. Melakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja satker secara serentak.	Melakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja satker secara serentak.
	2. Melibatkan pimpinan satuan kerja dalam evaluasi SAKIP.	Melibatkan pimpinan satuan kerja dalam evaluasi SAKIP.
	3. Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis satuan kerja.	Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis satuan kerja.
2. Kurangnya kepedulian dan dukungan sebagian pegawai dalam mengimplementasikan SAKIP.	Melakukan pendampingan evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan seluruh pegawai.	Melakukan pendampingan evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan seluruh pegawai.
3. Kekurangan dokumen pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja.	1. Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.	Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.
	2. Melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.	Melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.
	3. Melakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Melakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
4. Belum seluruh satker membentuk tim SAKIP.	Mewajibkan seluruh satuan kerja membentuk tim SAKIP	Mewajibkan seluruh satuan kerja membentuk tim SAKIP

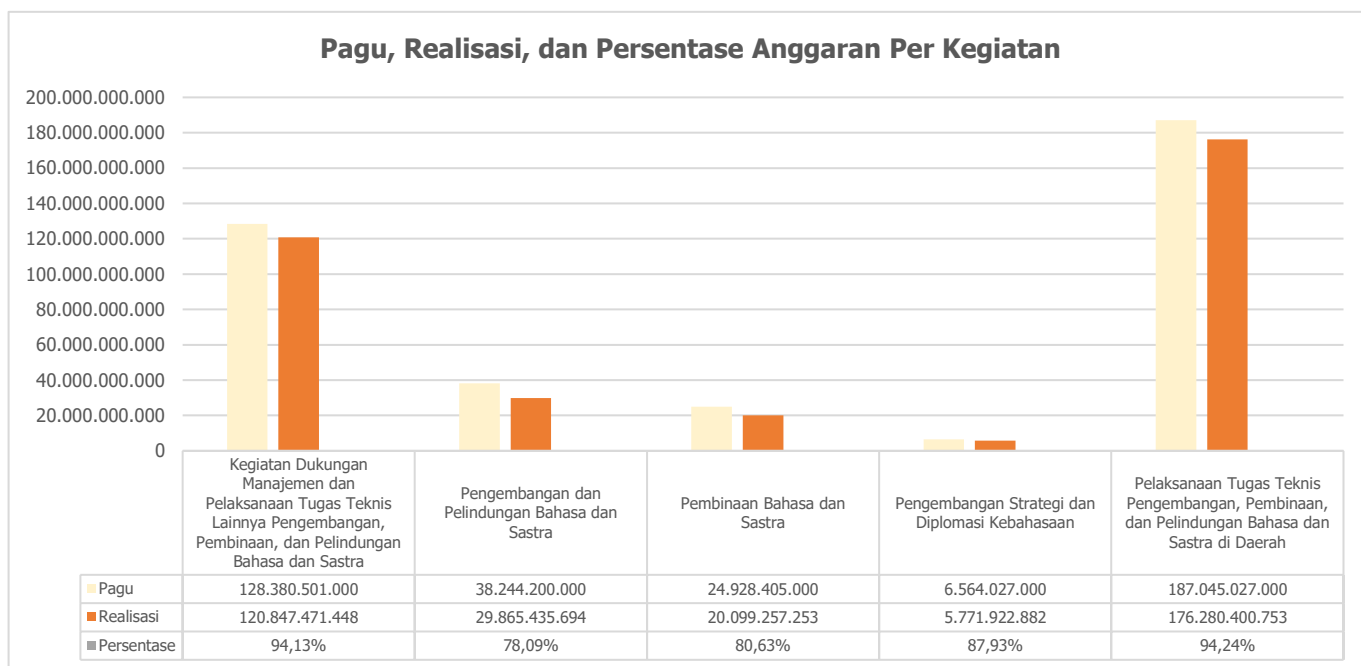
### Indikator Kinerja Program 5.2: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	0	2	1	50	8



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Belum adanya kesepahaman pada satuan kerja yang ditunjuk terkait data dukung lembar kerja evaluasi ZI-WBK.	Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.	Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.
2. Standar minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja dalam pemenuhan layanan belum seragam.	Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.	Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.

## Pagu, Realisasi, dan Persentase Anggaran Per Kegiatan



**A. Gambaran Umum**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) merupakan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). BPP Bahasa merupakan organisasi Eselon I yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

BPP Bahasa menjadi salah satu lembaga Kemdikbud tertua yang cikal-bakalnya sudah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Sejak tahun 1930, BPP Bahasa fokus untuk menangani persoalan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Secara lengkap, perjalanan sejarah BPP Bahasa dapat dilihat melalui laman resmi BPP Bahasa: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>.

Sejak 8 Mei 2020, BPP Bahasa dikepalai oleh Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 1280 orang. BPP Bahasa mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Dalam PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, BPP Bahasa diberi amanah untuk melakukan (1) upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional; (2) pembinaan bahasa sebagai upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat; (3) pelindungan bahasa sebagai upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya; serta (4) peningkatan



fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona



Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Secara organisasi dan tata kelola, pada tahun 2020, BPP Bahasa tidak mengalami perubahan. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2019 tetap berlaku. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyatakan adanya perubahan organisasi dan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang

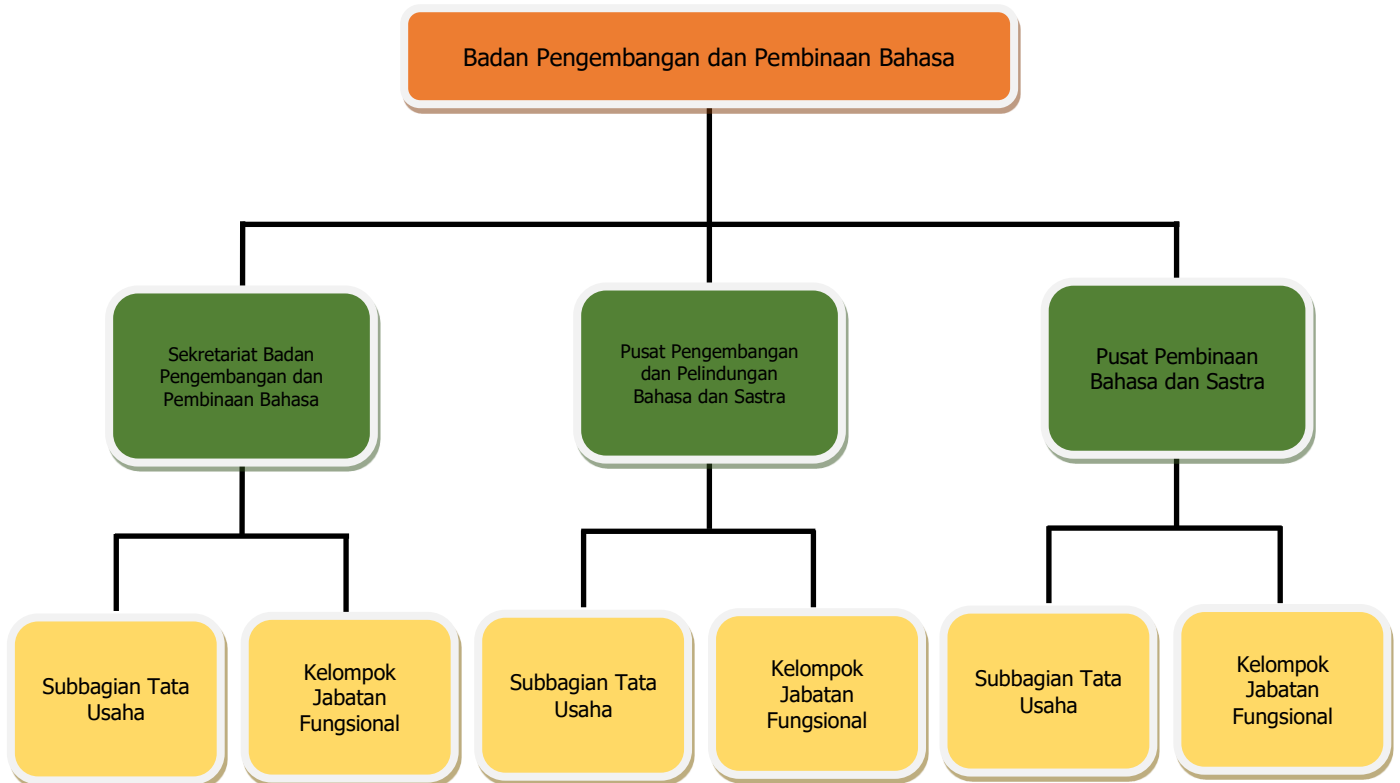


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Pasal 242, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra serta menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (b) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (d) pelaksanaan administrasi Badan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas: (a) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; (b) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra; dan (c) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

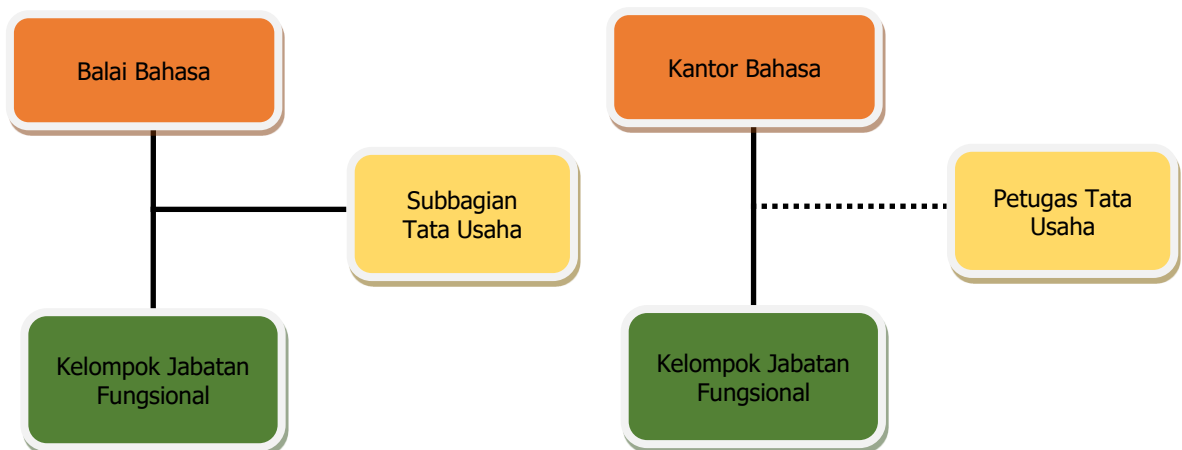
Selain Tiga Eselon II yang disebutkan dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, BPP Bahasa secara tugas dan fungsi juga didukung oleh 30 unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas 17 Balai Bahasa dan 13 Kantor Bahasa yang diatur dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya, Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan fungsi (a) pengkajian bahasa dan sastra; (b) pemetaan bahasa dan sastra; (c) pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia; (d) fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra; (e) pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan; (f) pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan. Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.



## Struktur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



## Struktur Unit Pelaksana Teknis



## D. Isu Strategis/Permasalahan

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh ujian. Pandemi Covid-19 (Corona) menyebabkan krisis global dan berdampak pada semua sektor. UNESCO menyatakan bahwa pandemi Corona juga berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh



dunia dan mengancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah demi menekan penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pembatasan sosial ini tidak hanya berimbas pada proses belajar-mengajar di sekolah, tetapi seluruh aktivitas pendukung dunia pendidikan. BPP Bahasa sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terimbas dampak pandemi Corona. Hampir seluruh aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti penyuluhan, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, tes UKBI dan lainnya dibatasi aktivitas bersemuka (tatap muka).

Selain pandemi, perbedaan status eselonisasi UPT BPP Bahasa juga perlu mendapat perhatian. Sebanyak 17 UPT merupakan unit kerja eselon III dengan nama Balai Bahasa. Sementara itu, sebanyak 13 UPT merupakan unit kerja eselon IV dengan nama Kantor Bahasa. Meskipun sejatinya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa, Balai dan Kantor Bahasa yang menjadi garda depan Kemdikbud dan langsung bermitra dengan pemangku kepentingan di daerah sudah saatnya diperkuat status kelembagaannya. Kehadiran Balai dan Kantor Bahasa diharapkan mampu berperan lebih strategis untuk menanggulangi berbagai persoalan kebahasaan di daerah, antara lain (a) punahnya bahasa/sastra, (b) rendahnya literasi siswa, dan (c) kurangnya pemanfaatan bahasa/sastra daerah untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal. Para Kepala Balai dan Kantor Bahasa lebih dituntut kemampuan dalam berkolaborasi dengan pemimpin daerah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM di daerah melalui pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.

Selain kelembagaan, permasalahan lain terkait dengan beberapa program yang diampu oleh BPP Bahasa perlu juga dicarikan solusi, inovasi, dan kreasi agar



tuntas dan tidak berulang. Sejak UU 24 Tahun 2009 terbit, amanah UU tersebut belum menguatkan BPP Bahasa sebagai salah satu unit utama yang bertanggung jawab pada dunia pendidikan. Untuk mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya, masih sulit dilakukan. Permendikbud 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagai satu regulasi yang diharapkan sebagai jalan pembuka juga belum mumpuni. Jenjang pendidikan yang disebutkan dalam permendikbud tersebut seharusnya diuji kemahiran berbahasanya secara berkala, sampai saat ini belum secara menyeluruh terlaksana.

Selain itu, persoalan terkait dengan penanganan literasi juga masih terjadi. Pada periode renstra 2015—2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penanganan literasi terkendala pada: (1) distribusi buku bacaan literasi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia (hanya wilayah 3T); (2) belum meratanya sasaran penerima manfaat buku bacaan literasi (hanya untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SM); (3) belum seluruh judul dapat didistribusikan (hanya 60 dari 718 judul buku); dan (4) belum seluruh judul memenuhi standar penilaian oleh Pusat Perbukuan. Pada renstra periode 2020—2024, literasi yang menjadi salah satu fokus yang diamanahkan dalam RPJMN juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kolaborasi antarunit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum dilaksanakan. Sinkronisasi program antarunit di Kemdikbud merupakan keniscayaan yang dapat dilakukan bersama melalui dua pintu utama: pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal Pendidikan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berkolaborasi dengan tiap unit utama dengan titik temu, terutama pada kata literasi. Sinkronisasi program dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang literat dan berdaya saing. Produk yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dapat dimanfaatkan oleh unit utama lain untuk meningkatkan literasi siswa didik. Alat uji kemahiran berbahasa yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dapat dimanfaatkan oleh



semua pemangku kepentingan pendidikan untuk memetakan kemahiran berbahasa siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam hal kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berkolaborasi secara intensif dengan Ditjen Kebudayaan karena kedua instansi tersebut menyelenggarakan program yang sama, yaitu Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. Berdasarkan uraian pekerjaan, terdapat banyak hal yang bisa dikolaborasikan agar menghasilkan dampak yang lebih positif bagi masyarakat. Misalnya, kolaborasi antara UPT Balai Bahasa dan UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya dalam rangka penelitian naskah kuno (manuskrip) dan alih wahana karya lama menjadi karya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain mengoptimalkan sumber daya bersama, kolaborasi semacam ini juga dapat menghasilkan publikasi dan dampak yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan secara sendiri-sendiri.

Tantangan lainnya adalah menggiatkan pencapaian prioritas program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, atau yang dalam nomenklatur perencanaan disebut Sembilan Prioritas Nasional. Sembilan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

1. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina
2. Kamus dan Pengembangan istilah
3. Rekomendasi Kebijakan melalui Penelitian Bahasa dan Sastra
4. Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah
5. Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra
6. Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
7. Gerakan Literasi Nasional
8. Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra
9. Pemelajar Bahasa Asing



Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BPP Bahasa telah merancang dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (rencana kerja pemerintah/RKP 2020) yang strategis dan sistematis dan rencana kerja (Renja 2020) dengan berdasarkan pada skala prioritas.

Dalam rancangan RKP 2020 dan Renja 2020, BPP Bahasa menyusun kerangka ini berlandaskan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Arah dan kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memenuhi sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, yakni **Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan.**

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diturunkan ke dalam Sasaran Program Renstra BPP Bahasa, yakni

- a. Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia;
- b. Meningkatnya Budaya Literasi;
- c. Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah;
- d. Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional; dan
- e. Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas.



### **Visi**

Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 mengacu pada visi Presiden, yaitu

**“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong, dan Berkebinekaan Global”**

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.

### **B. Misi**

Untuk mencapai visi Presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan misi 5 tahun ke depan, yaitu:

- 1) Mewujudkan Ekosistem Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Mendukung Budaya Riset dan Inovasi Kebahasaan yang Kreatif;**
- 2) Mewujudkan Praktik-Praktik Pendidikan Literasi di Masyarakat untuk Meningkatkan Budaya Literasi yang Tinggi yang Ditopang oleh Teknologi Digital;**
- 3) Mewujudkan Penguatan Diplomasi Kebahasaan yang Maju;**
- 4) Mewujudkan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang Dinamis Berbasis Kekuatan Masyarakat;**
- 5) Mewujudkan Layanan Profesional Kebahasaan.**



### C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan misi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis lembaga, yaitu

1. peningkatan kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra;
2. peningkatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan tujuan strategis pertama, dicapai melalui indikator (1) Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia; dan (2) Jumlah penutur muda bahasa daerah. Sementara itu, keberhasilan tujuan strategis kedua, dicapai melalui indikator Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB. Tujuan, indikator, dan target pencapaian sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Tujuan Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Tujuan		Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kualitas Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	1.1 Rata-rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
		1.2 Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
2	Peningkatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	2.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB

Untuk mencapai tujuan strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan target tahunan yang akan dicapai dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020.



**Tabel 2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja	Anggaran
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesian Mahir Teruji	42%	54.810.460.000
		1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	26%	13.014.988.000
2	Meningkatnya Budaya Literasi	2. 1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks 58,2	4.419.783.000
3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks 0.55	20.196.047.000
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	30 Negara	965.924.000
		4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	75.865 Orang	10.815.252.000
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	Predikat BB	25.928.006.000
		5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2 Satker	252.747.060.000



Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memasuki babak baru periode 2020—2024. Target yang telah ditentukan dalam renstra akan disampaikan capaiannya pada bab ini beserta uraian capaian tahun 2020. Pada bab ini juga akan diuraikan langkah, strategi, dan hambatan dalam upaya merealisasikan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BPP Bahasa berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban itu akan disampaikan secara konsisten setiap tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dapat dijadikan sebagai (1) bahan evaluasi kinerja lembaga; dan (2) bahan pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

#### **A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki lima Sasaran Program (SP) dengan Delapan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Berikut informasi capaian kinerja BPP Bahasa pada 2020 serta tahapan capaian yang diperoleh selama tahun 2020.

#### **Sasaran Program 1: Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia**

Untuk menyetarakan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan Uji Kemahiran Berbahasa



Indonesia (UKBI). UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

	Predikat: Istimewa (Skor: 725—800) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiah.
	Predikat: Sangat Unggul (Skor: 641—724) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala.
	Predikat: Unggul (Skor: 578—640) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks.
	Predikat: Madya (Skor: 482—577) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.
	Predikat: Semenjana (Skor: 405—481) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiah, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang tidak kompleks.
	Predikat: Marginal (Skor: 326—404) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah.
	Predikat: Terbatas (Skor: 251—325) Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan bahwa potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

PERINGKAT UKBI

Penggunaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Hak Cipta UKBI tertuang di dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 023993 dan 023994 tertanggal 8 Januari Tahun 2004 dan

telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Untuk itu, BPP Bahasa menetapkan meningkatkan kemahiran berbahasa ke dalam Sasaran Program Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia. Sasaran program ini memiliki dua indikator, yaitu (1) Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji; dan (2) Persentase Wilayah yang



Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Berikut ini informasi terkait kedua indikator tersebut.

### **Indikator Kinerja Program 1.1: Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji**

IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini merupakan persentase yang menunjukkan kemahiran penutur dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis, serta kemahiran tentang merespons kaidah bahasa Indonesia. Keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara (dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan). Selain itu, UKBI mengukur keterampilan reseptif dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis (dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis). UKBI juga mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.

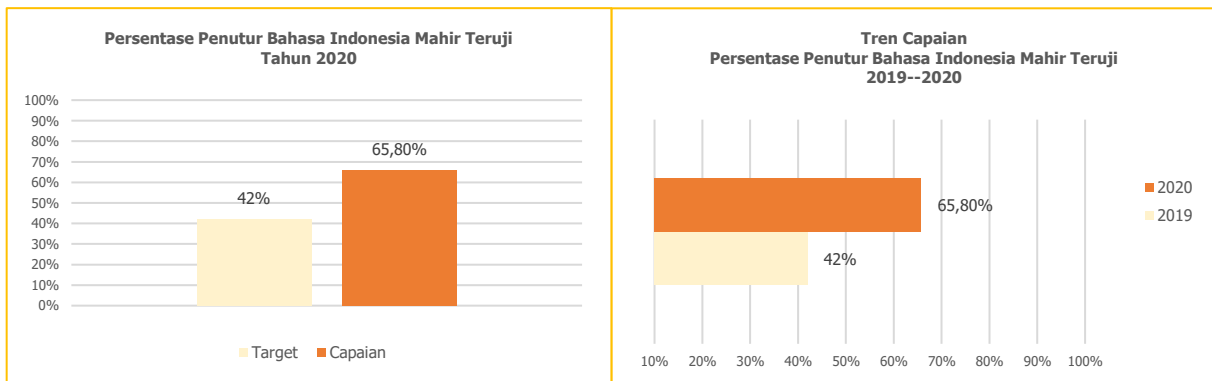
Sasaran UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beragam profesi dan tingkat pendidikan (guru, dosen, pelajar, mahasiswa, peneliti, penulis, penerjemah, wartawan, juru bahasa, warga negara asing penutur bahasa Indonesia, dan profesional lain).

Keikutsertaan dalam UKBI juga menanamkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi penghela ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kesadaran itu dapat tumbuh dengan melihat keragaman topik dalam teks UKBI yang mencakupi berbagai dimensi pengetahuan. Dengan kesadaran tersebut diharapkan tingkat literasi peserta didik pun akan meningkat. Berikut ini capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji.



**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi**  
**IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
1 Meningkatkan Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.1 Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	42%	42%	65,80%	156,67%	50%



Capaian target IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji, tercapai sebesar 156,67% atau 3.668 orang yang mahir dari jumlah peserta UKBI sebanyak 5.584 orang. 156% tersebut diperoleh dari peserta UKBI dari Indonesia dengan kriteria mahir teruji dari 3 jenis kategori profesi, yaitu pelajar 338 orang, mahasiswa 2.328 orang, dan profesional sebanyak 1.002 orang. Seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga profesional dan calon tenaga profesional karena telah dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal;
2. memiliki keterampilan yang menunjang tugas,
3. melakukan tugas berdasarkan prosedur tertentu (legalitas);
4. memiliki standar pekerjaan;
5. mampu menggunakan fasilitas dan peralatan yang tepat;
6. memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab;
7. mengembangkan ilmu melalui kajian ilmiah/penelitian;
8. menggabungkan diri dalam organisasi profesi;
9. memiliki sumber penghasilan yang jelas; dan
10. memiliki sikap yang profesional.



Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 4**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi**  
**IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Kesulitan pelaksanaan UKBI berbasis kertas di masa pandemi Covid-19	1. Melakukan tes UKBI jarak jauh.	Melakukan UKBI jarak jauh dengan menggunakan aplikasi UKBI Dinamis yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
	2. Melaksanakan UKBI tatap muka (berbasis kertas) sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.	Mengalihwahanakan buku kiat-kiat kemahiran berbahasa dalam bentuk aplikasi.
2. Sosialisasi UKBI yang dilakukan secara tatap muka terhambat karena pandemi Covid-19	Sosialisasi Kiat-Kiat Kemahiran Berbahasa Indonesia.	Sosialisasi Kiat-Kiat Kemahiran Berbahasa Indonesia.



Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Pelajar di Sekolah Pahoa, Tangerang, dan Sekolah Al Kausar Islamic Boarding School Indonesia, Sukabumi, pada bulan Februari 2020

### **Indikator Kinerja Program 1.2: Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

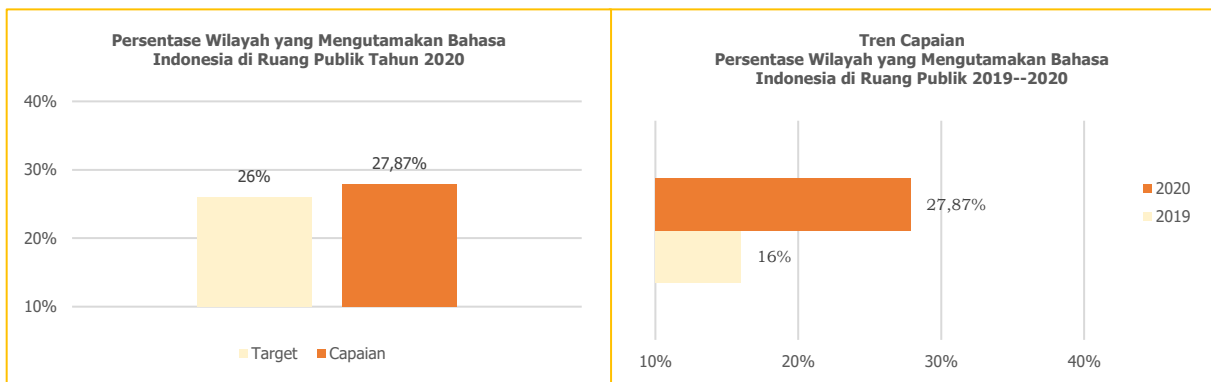
Wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan wilayah yang lanskap ruang publiknya ditandai dengan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, bukan bahasa asing atau bahasa daerah. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik adalah perbandingan antara kabupaten/kota yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dengan jumlah total kabupaten/kota yang ada di Indonesia.



Angka dasar 16% merupakan perbandingan antara kabupaten/kota berkategori A dan B (sebanyak 84 kabupaten/kota) dibandingkan jumlah total kabupaten/kota yang ada di Indonesia (sebanyak 514 kabupaten/kota). Berikut ini target dan realisasi IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.2 Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	16%	26%	27,87%	107,19%	65%



Target 26% adalah akumulasi target dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, upaya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik telah mencapai 61 kabupaten/kota (32 kabupaten/kota yang telah divalidasi, 29 belum divalidasi). Berikut ini kabupaten/kota yang telah divalidasi.

**Tabel 6**  
**Tingkat Keterkendalian Kabupaten/Kota yang Telah Divalidasi**

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Terkendali	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Terkendali
1	Kabupaten Batang Hari	Jambi	A	17	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	B
2	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	A	18	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	B
3	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	B	19	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	B
4	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	B	20	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	A
5	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	B	21	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	A



No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Terkendali	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Terkendali
6	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	B	22	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	A
7	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	A	23	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	A
8	Kabupaten Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	B	24	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	B
9	Kota Cilegon	Banten	B	25	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	A
10	Kabupaten Lebak	Banten	A	26	Kota Bontang	Kalimantan Timur	B
11	Kabupaten Pandeglang	Banten	A	27	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	A
12	Kabupaten Pematang	Jawa Tengah	B	28	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	B
13	Kota Surakarta	Jawa Tengah	B	29	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	A
14	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	B	30	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	A
15	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	B	31	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	A
16	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	B	32	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	A

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan berbagai upaya. Upaya awal yang dilakukan ialah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan agar upaya pemantauan, sosialisasi, dan audiensi pengutamaan bahasa negara, aksi pengutamaan bahasa negara, pemberian penghargaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis pada lembaga/badan publik yang dilakukan di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, BPP Bahasa juga melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.

**Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara**  
di Ruang Publik Lembaga Pendidikan Tingkat SMA di DKI Jakarta

Narasumber  
E. Aminudin Aziz  
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
M. Husin  
Kepala Bidang SMP dan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Yusuf Adrian  
Pengembang Teknologi Pembelajaran, Direktorat Sekolah Menengah Atas

Senin, 16 November 2020  
pukul 08.00—13.00 WIB  
\*kelas melalui Zoom

Saksikan siaran langsung secara daring pada kanal Youtube  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
pendaftaran melalui <http://tingkas.kemdikbud.go.id/daftar/sosialisasiLPD>  
Narahubung: Anis Rahmawati (082223143258)

Peserta terbatas. Sertifikat-el  
\*hanya 400 peserta

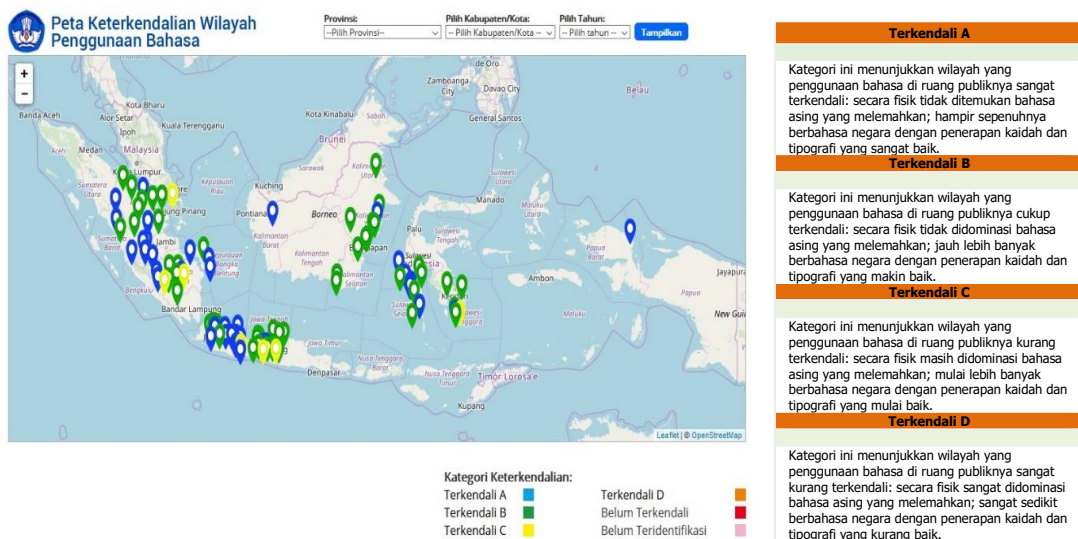
badanbahasa.kemdikbud.go.id @BadanBahasa badanbahasakemdikbud Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 7**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Masa pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan antarwilayah menimbulkan kesulitan untuk melakukan pengambilan data di ruang publik.	Pelaksana kegiatan melakukan Konsinyasi Daring Verifikasi dan Pengolahan Data Pantauan Pengendalian Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik melalui aplikasi Zoom.	Pelaksana kegiatan menggunakan aplikasi peta keterkendalian untuk mempermudah pemantauan.
2. Banyak lembaga/badan publik yang ditutup pada masa pandemi.	Pelaksana kegiatan melakukan koordinasi melalui grup Tim Pemantauan.	Pelaksana kegiatan melakukan koordinasi melalui grup Tim Pemantauan.



## Sasaran Program 2: Meningkatkan Budaya Literasi

Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.



Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.

### **Indikator Kinerja Program 2.1: Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)**

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai alat ukur untuk melihat gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadikan dimensi budaya literasi sebagai alat ukur ketercapaian Meningkatnya Budaya Literasi. Nilai dimensi ini diperoleh dari tiga indikator, yaitu

1. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik;
2. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet;
3. persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.



Angka dasar sebesar 55,03 diperoleh dari Nilai Dimensi Literasi IPK tahun 2018. Nilai 71,04 merupakan target pada akhir periode RPJMN 2020—2024. Berdasarkan rentang nilai tersebut, target tiap tahun ditentukan naik sebesar 2,67. Pada tahun 2020, intervensi Badan Pengembangan



dan Pembinaan Bahasa untuk meningkatkan nilai dimensi budaya literasi dilakukan dengan berbagai upaya. Beberapa upaya yang dilakukan BPP Bahasa adalah sebagai berikut.

1. Buku Bermutu yang Diterjemahkan bertema (sastra (novel), pengembangan diri/kepribadian dan kreativitas berpikir, teknologi pembelajaran digital, dan pemikiran besar (arus utama) dalam ilmu-ilmu eksakta (nomotetik) dan sosial humaniora (ideografis)).

**Tabel 8**  
**Judul Buku yang Diterjemahkan**  
**dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia**

No.	Penerbit	Tahun Terbit	Judul Buku Sumber	Judul Buku Terjemahan
1	Gramedia Pustaka Utama	2014	Obstacle Is The Way	Rintangan Adalah Jalan
2		2019	The Infinite Game	Permainan Yang Tak Berujung
3		2014	Becoming A Strategic Leader	Kepemimpinan Strategis
4		2019	Digital Minimalism	Minimalisme Digital
5	Airlangga University Press	2014	Digital Literary Studies	Studi Sastra Digital
6		2016	Literary Mapping in the Digital Age	Pemetaan Sastra di Era Digital

2. Buku Pengayaan Literasi

Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan literasi pada tahun 2020 mengangkat tema “ASEAN dan Toleransi”. Kegiatan tersebut



bertujuan untuk menyediakan bahan bacaan literasi yang bermutu guna meningkatkan minat baca anak usia SD, terutama kelas 4, 5, dan 6.

### Buku Pengayaan Literasi Tahun 2020



**Tabel 9**  
**Judul Buku Pengayaan Literasi Tahun 2020**

No.	Judul	No.	Judul
1	Ayo, Mengenal Negara ASEAN!	16	Nona Bupu: Pemandu Cilik dari Lereng Gunung Inerie
2	Berkenalan dengan Tokoh Pendiri ASEAN	17	Nyadran: Belajar Toleransi pada Tradisi
3	Candiku yang Terhebat	18	Membuat Dunia Tersenyum
4	Cerita dari Suku Baduy	19	Pesan Damai Nasi Kembar
5	Dendang Hati Gigih	20	Petualangan Antropolog Cilik: Mengunjungi Suku-Suku Pedalaman di Asia Tenggara
6	Dengung Lebah	21	Petualangan ke Masa Lalu
7	Festival Cap Go Meh di Singkawang, Kalimantan Barat	22	Satwa Pejuang
8	Gonggongan Mengki	23	Sehari di Desa Sade
9	Indahnya Kampung Toleransi di Bandung	24	Sepasang Mata
10	Kampung ASEAN	25	Siti Tedak Sinten
11	Karpet Ajaib	26	Festival Persahabatan
12	Keriting atau Lurus, Semua Istimewa	27	Jurnal Juna
13	Ketika Yanti Pindah ke Yogja	28	Warna-Warni Kemah Sains
14	Menjelajahi Wisaha ASEAN	29	Yuk, Berwisata ke Negara-Negara ASEAN
15	Meski Berbeda, Kita Tetap Bersahabat	30	Tim Diaspora Sang Juara



Selain itu, di tahun 2020 dilaksanakan penyusunan komik yang diadaptasi dari buku bacaan literasi yang telah tersusun pada tahun 2016—2018.

#### Komik Pengayaan Literasi



**Tabel 10**  
**Judul Buku Komik Tahun 2020**

No.	Judul	No.	Judul
1	Petualangan Sangga	16	Si Saloi
2	Perjuangan Mone	17	Teladan I Maninrori dan Karaeng Pattingaloang
3	Ramuan Sehat Lita dan Rasi	18	Datuk Hitam dan Bajak Laut
4	Kawanku Anak Badui	19	Pejuang dari Palagan
5	Cut Nyak Meutia Pahlawanku	20	Mengukir Keindahan Lamin
6	Ada Jejak Di Kaki Ciremai	21	Danau Laut Todor
7	Literasi Sang Nahkoda	22	Tuah Badia Badia Batuang
8	Topeng Kayu Sudar	23	Lalang
9	Rumah Bolon	24	Dalem Boncel
10	Dio dan Serulingnya	25	Jejak Jejak Hutan
11	Danis Sang Pemenang	26	Abimanyu
12	Cerita Anak Teluk Youtefa	27	Si Bokek
13	Lamang Persaudaraan	28	Meraih Mimpi
14	Batik Tambal Anom	29	Menebang Bukit
15	Cerita Dini	30	Tiga Sekawan Dan Kincir Air

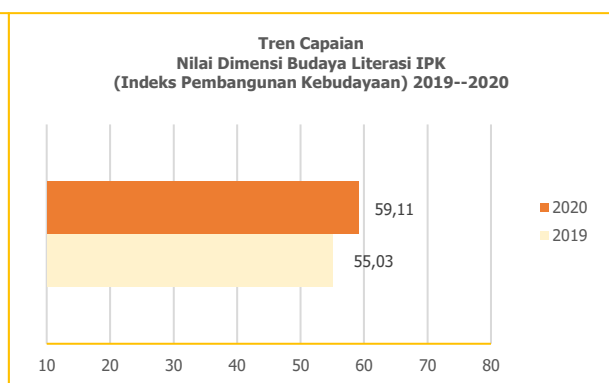
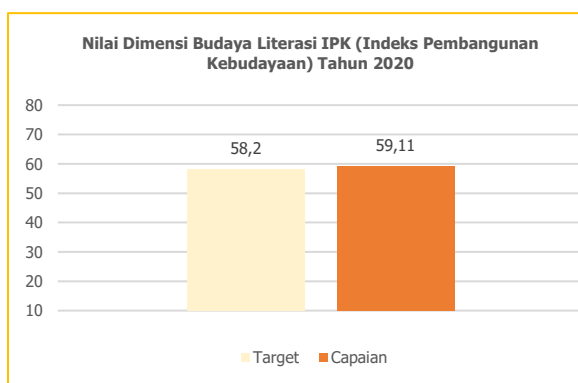
3. Hasil karya residensi Sastrawan di Daerah 3T sebanyak 5 Judul
  1. Dobo: Dari Suatu Percakapan karya Widyanuari Eko Putra
  2. Pijar Paras Pesisir Barat: Sebuah Catatan Perjalanan karya Toni Lesmana



3. Ziarah ke Hati yang Tahir karya Royyan Julian
4. Lembah Apapuhang dan Hikayat Orang-Orang Kecil karya Darwanto
5. Menjelajahi Berau dalam Mitos dan Ragam Suku karya Farizal
4. Bimbingan Teknis Instruktur Literasi Digital Tingkat Nasional dalam Rangka GLN bagi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
5. Peningkatan Mutu Praktik Baik Pembelajaran Literasi Digital dalam Rangka GLN melalui Bimbingan Teknis Praktik Baik Pembelajaran Sastra Berbasis Literasi Digital bagi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
6. Menambah jumlah bahan bacaan digital sejumlah 654 judul pada laman <https://budi.kemdikbud.go.id/>
7. Membuat buku audio disnetra sejumlah 20 dengar
8. Pemanfaatan video alihwahana bahan bacaan literasi 2 dan 3 dimensi serta dokudrama pada program belajar di rumah yang ditayangkan oleh TVRI.

**Tabel 11**  
**Target dan Realisasi**  
**IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
2 Meningkatkan Budaya Literasi	2.1 IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	55,03	58,2	59.11	100.74	71,04



Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 12**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat kondisi pandemi Covid-19	Metode pelaksanaan kegiatan dengan sistem kerja pada masa pandemi Covid-19	Mengoptimalkan media daring dalam pelaksanaan pertemuan penulis.
2. perbedaan interpretasi pekomiik terhadap skenario	Mengadakan diskusi dan observasi daring yang intensif dengan para penulis.	Mengadakan diskusi dan observasi daring yang intensif dengan para penulis.
3. Tidak semua penerbit yang mendaftar seleksi sudah memiliki hak terjemahan dengan penerbit luar negeri		

### **Sasaran Program 3: Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah**

Sasaran Program ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa dan sastra diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.

### **Indikator Kinerja Program 3.1: Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah**

Indeks vitalitas atau daya hidup suatu bahasa daerah merujuk pada indeks intensitas penggunaan dan eksistensi bahasa daerah itu sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks sosial untuk tujuan tertentu. Salah satu subindikator bahasa daerah dapat dikatakan memiliki vitalitas yang tinggi apabila penutur muda bahasa daerah tersebut berjumlah banyak dan variasi bahasa tersebut digunakan secara luas. Karakteristik ini juga merupakan salah satu ciri bahasa yang akan terus digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Daya hidup atau vitalitas bahasa dapat diketahui dari dua hal yang dihubungkan, yaitu hubungan semua indeks indikator dengan karakteristik responden sebagai penutur bahasa asli. Indeks indikator meliputi (1) penutur, (2) kontak



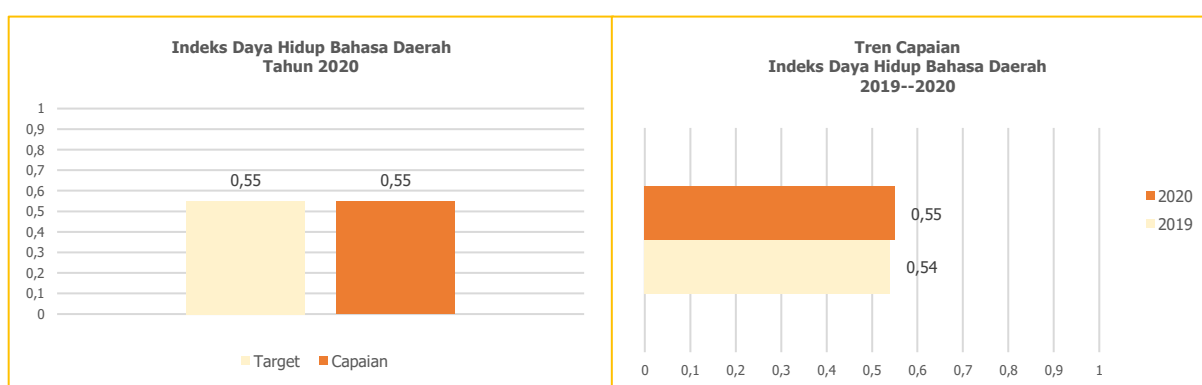
bahasa, (3) bilingualisme, (4) posisi dominan masyarakat penutur, (5) ranah penggunaan bahasa, (6) sikap bahasa, (7) regulasi, (8) pembelajaran, (9) dokumentasi, dan (10) tantangan baru.

Tingkatan status vitalitas bahasa yang ditetapkan dari hasil kajian terdiri atas kategori aman (indeks 0,81—1,00), rentan (0,61—0,80), mengalami kemunduran (0,41—0,60), terancam punah (0,21—0,40), kritis (0,00—0,20), hingga punah (indeks 0,00). Penentuan indeks ini diperoleh dari rerata indeks sepuluh indikator pengujian vitalitas bahasa yang telah disebutkan di atas.

Adapun Penentuan indeks yang menjadi target Sasaran Program didasarkan pada rata-rata indeks bahasa dan sastra yang mengalami kemunduran dalam rentang 0,41 hingga 0,60, yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. Berikut ini capaian IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah.

**Tabel 13**  
**Target dan Realisasi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
3 Meningkatkan Daya Hidup Bahasa Daerah	3.1 Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	0,54	0,55	0,55	100	0,59

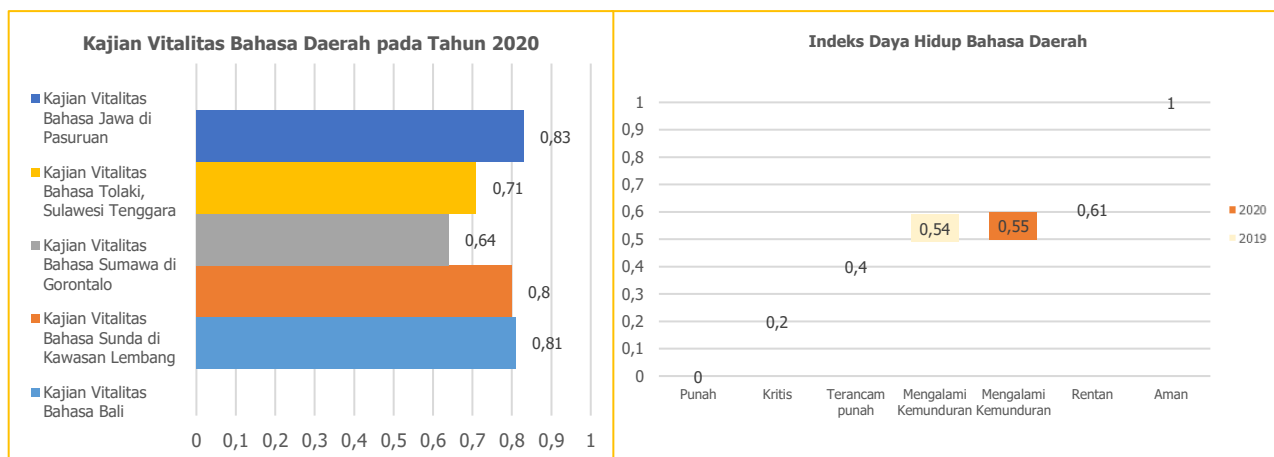


Pada tahun 2020 dilakukan kajian vitalitas di lima balai/kantor bahasa. Indeks tahun 2020 berasal dari rerata indeks vitalitas bahasa yang dilakukan oleh lima balai/kantor bahasa, yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai



Bahasa Provinsi Bali, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Akumulasi perhitungan capaian indeks daya hidup bahasa daerah sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 0,55 atau tergolong mengalami kemunduran dengan angka dasar pada tahun 2019 sebesar 0,54.

**Tabel 14**  
**Kajian Vitalitas Bahasa Daerah dan Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah**



Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 15**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan kajian vitalitas sulit dilaksanakan secara tatap muka, padahal kegiatan kajian vitalitas harus dilakukan secara tatap muka. Wawancara dan penggalan data kajian vitalitas tidak dapat dilakukan secara daring. Hal ini disebabkan kajian vitalitas bahasa harus melibatkan penutur jati bahasa daerah yang sebagian besar tidak melek teknologi. Hal lain adalah keadaan masyarakat penutur bahasa daerah yang dipilih biasanya berada pada lokasi yang sulit dijangkau dan diakses, baik transportasi maupun jaringan internet.	1. Kajian vitalitas bahasa daerah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah yang tersebar di ibu kota provinsi. Beberapa UPT mengerjakan kajian vitalitas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, penentuan nilai rerata indeks vitalitas bahasa diperoleh dari kajian yang dilakukan oleh beberapa UPT pada tahun 2020.	Kajian vitalitas bahasa daerah dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT).
	2. Beberapa inovasi dilakukan dalam rangka program perlindungan bahasa daerah, yaitu. Dalam penyusunan jurnal edisi khusus, tim teknis perlindungan bahasa bekerja sama dengan tim Jurnal	Penyusunan jurnal edisi khusus tahun 2020 dan diseminasi hasil perlindungan bahasa melalui kegiatan Seri Diskusi Daring (SDD) Pelindungan Bahasa



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
<p>Kategori bahasa yang dikaji merupakan bahasa daerah yang berkategori terancam punah dan kritis yang letaknya biasanya jauh dari perkotaan.</p> <p>Sebagian besar metode perlindungan bahasa dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan mencari dan mendatangi informan. Pembatasan mobilitas dan pelaksanaan kegiatan menyebabkan wawancara langsung tidak mungkin untuk dilakukan. Untuk melaksanakan secara jarak jauh (daring) pun, calon informan dikhawatirkan belum paham penggunaan teknologi. Meskipun informan paham penggunaan teknologi, proses menggali informasi yang dilakukan secara daring, yang pelaksanaannya tergolong lama, dikhawatirkan akan membuat informan merasa jenuh dan lelah.</p>	<p>"Ranah". Penerbitan jurnal edisi khusus ini bertujuan untuk mendukung pencapaian penyusunan dokumen kebahasaan, khususnya dalam konteks perlindungan bahasa.</p>	
<p>2. Kurang optimalnya koordinasi antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah.</p>	<p>Menguatkan koordinasi melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pelindungan Bahasa dan Sastra.</p>	<p>Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Pelindungan Bahasa dan Sastra melibatkan pusat dan daerah.</p>

#### **Sasaran Program 4: Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional**

Indonesia merupakan negara yang besar. Banyak orang asing yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia, baik untuk tujuan investasi maupun sekadar menikmati keindahan alamnya. Faktor tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ingin dipelajari oleh warga negara asing. Saat ini, banyak negara memiliki program pengajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di sekolah, universitas, perwakilan Republik Indonesia, atau lembaga lainnya.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupaya untuk memfasilitasi lembaga-lembaga penyelenggara program pengajaran bahasa



Indonesia di luar negeri tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Pasal 31 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa



**Pembukaan Program BIPA di University of Vienna, Austria**

(1) Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa dan (2) Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

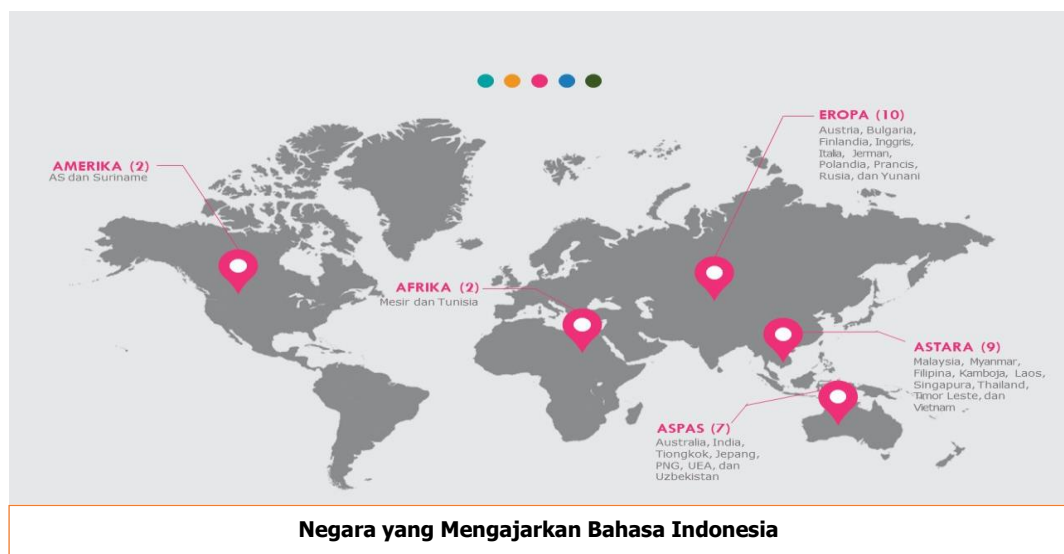
1. penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional;
2. pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing;
3. peningkatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan luar negeri;
4. pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri; dan/atau
5. upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam implementasinya, upaya yang dilakukan adalah menyiapkan pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang kompeten dan memiliki wawasan yang luas. Kewajiban mereka tidak hanya untuk mengajar bahasa Indonesia, melainkan juga untuk menjadi agen diplomasi, serta menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, pengajar-pengajar tersebut akan ditugasi untuk mengajarkan bahasa Indonesia dan



melaksanakan diplomasi kebahasaan lainnya melalui kegiatan Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri.

Kegiatan ini secara umum bertujuan menyebarkan bahasa Indonesia ke mancanegara melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan jumlah warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitasi pengajaran bahasa Indonesia bagi lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri melalui penyediaan pengajar ahli dan penyediaan bahan pendukung pengajaran BIPA. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendukung pelaksanaan diplomasi lunak melalui pelaksanaan diplomasi bahasa dan budaya dalam bentuk promosi bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat negara sahabat.

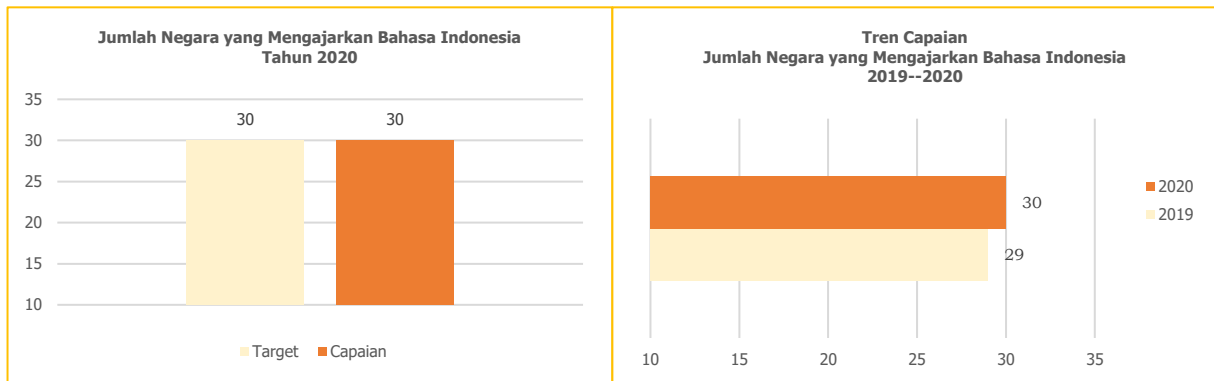


### Indikator Kinerja Program 4.1: Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Kegiatan penugasan tenaga pengajar BIPA untuk luar negeri pada tahun anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berikut ini capaian IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia.

**Tabel 16**  
**Target dan Realisasi**  
**IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.1 Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	29	30	100	34



Sampai dengan tahun 2020, jumlah negara yang menyelenggarakan program BIPA telah mencapai 30 negara dengan tambahan satu negara baru pada tahun 2020, yakni Yunani.



**Penugasan Tenaga Pengajar Lokal BIPA di Timor Leste dan Mesir**

Capaian ini diperoleh dengan strategi pengalihan skema kegiatan menyikapi kendala yang dihadapi. Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.



**Tabel 17**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ini. Sejak Maret 2020, pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia dihentikan untuk sementara, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan perjalanan dinas luar negeri. Penghentian ini dapat berpengaruh terhadap jumlah negara yang mendapatkan fasilitasi program BIPA.	Mengubah skema penugasan tenaga pengajar dari Indonesia dalam bentuk (a) pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA secara daring, baik dengan melibatkan pengajar dari Indonesia maupun pengajar lokal setempat; (b) mengoptimalkan kemitraan pengajaran BIPA melalui penugasan tenaga pengajar lokal, antara lain diaspora yang berdomisili di negara sasaran, warga negara asing alumni penerima beasiswa program pemerintah Republik Indonesia, seperti Darmasiswa, Kemitraan Negara Berkembang, dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dll., serta mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di luar negeri. Para duta bahasa negara ini diseleksi melalui mekanisme rekrutmen khusus guna menjamin mutu kompetensi dalam pengajaran BIPA. Dengan strategi ini, target IKP jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia tetap dapat tercapai meskipun pandemi Covid-19 masih mewabah.	Mengubah skema penugasan tenaga pengajar dari Indonesia dalam bentuk (a) pembelajaran jarak jauh (PJJ) BIPA secara daring, baik dengan melibatkan pengajar dari Indonesia maupun pengajar lokal setempat; (b) mengoptimalkan kemitraan pengajaran BIPA melalui penugasan tenaga pengajar lokal, antara lain diaspora yang berdomisili di negara sasaran, warga negara asing alumni penerima beasiswa program pemerintah Republik Indonesia, seperti Darmasiswa, Kemitraan Negara Berkembang, dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dll., serta mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di luar negeri. Para duta bahasa negara ini diseleksi melalui mekanisme rekrutmen khusus guna menjamin mutu kompetensi dalam pengajaran BIPA.
2. Adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebabkan salah satu unit eselon dua, yaitu Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) yang selama ini menangani kegiatan terkait ke-BIPA-an dilebur dengan unit eselon dua lain di lingkungan BPP Bahasa, yakni Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.	Melakukan koordinasi dengan berbagi pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.	Melakukan koordinasi dengan berbagi pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.
3. Terdapat beberapa Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang belum mendapatkan informasi tentang program BIPA.	Melaksanakan sosialisasi tentang program BIPA kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Melaksanakan sosialisasi tentang program BIPA kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

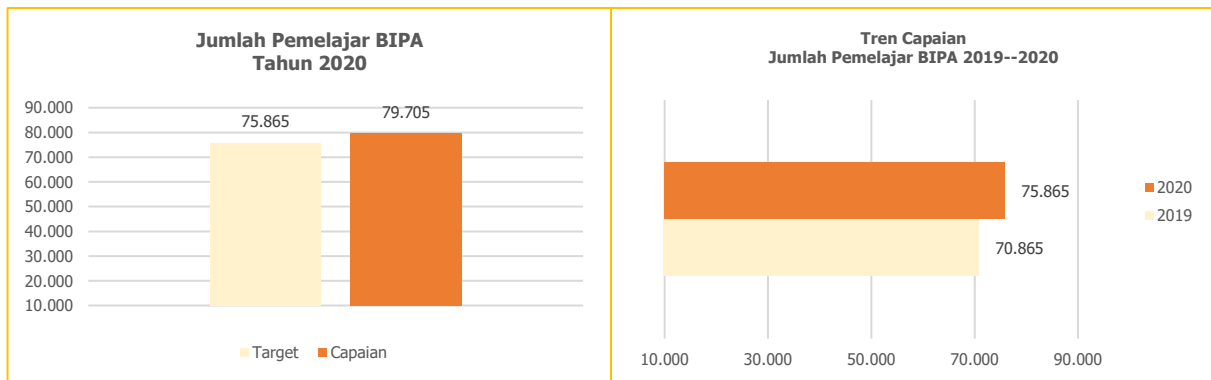


### Indikator Kinerja Program 4.2: Jumlah Pemelajar BIPA

Sampai dengan tahun anggaran 2020, jumlah pemelajar yang terfasilitasi program BIPA telah mencapai 79.705 orang pemelajar. Pada tahun anggaran 2020, jumlah pemelajar yang terfasilitasi program BIPA adalah sebanyak 8.840 orang pemelajar. Berikut ini capaian IKP Jumlah Pemelajar BIPA.

**Tabel 18**  
**Target dan Realisasi IKP Jumlah Pemelajar BIPA**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
			Target	Realisasi	%	
4 Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.2 Jumlah Pemelajar BIPA	70.865	75.865	79.705	105,06	95.865



Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi yang akan dilakukan agar pencapaian IKP dapat dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 19**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Pemelajar BIPA**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan ini. Salah satu akibatnya yaitu penghentian sementara kegiatan tatap muka di lembaga penyelenggara program BIPA.	Mengubah skema pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) BIPA secara daring dan mengoptimalkan penugasan tenaga pengajar lokal, yakni diaspora dan warga negara yang memiliki kompetensi dalam pengajaran BIPA yang berdomisili di negara sasaran, serta warga negara asing (alumni) penerima beasiswa pemerintah RI.	Mengubah skema pengiriman tenaga pengajar dari Indonesia menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) BIPA secara daring dan mengoptimalkan penugasan tenaga pengajar lokal, yakni diaspora dan warga negara yang memiliki kompetensi dalam pengajaran BIPA yang berdomisili di negara sasaran, serta warga negara asing (alumni) penerima beasiswa pemerintah RI.



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
2. Adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan unit eselon dua yang selama ini menangani program BIPA, yakni Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dilebur dengan unit eselon dua lain di BPP Bahasa, yakni Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Hal ini dapat berpengaruh pada tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan.	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perubahan struktur organisasi. Penyesuaian terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan dan penganggaran kegiatan juga dilakukan oleh tim pelaksana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dengan optimal.



Pemelajar BIPA di Umah Indo KBRI Hanoi, Vietnam dan Huntingtower School, Australia

### Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas

Tata kelola yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Salah satu upaya untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran dalam meningkatkan tata kelola yang baik satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan menetapkan dalam rencana strategis. Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tata kelola yang baik dalam Sasaran Program Kelima, yaitu Terwujudnya Tata



Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas. SP itu memiliki dua indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu (1) Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB; dan (2) Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut ini penjelasan capaian kedua indikator.



Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Pendampingan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2021

### **Indikator Kinerja Program 5.1: Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,



perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja.



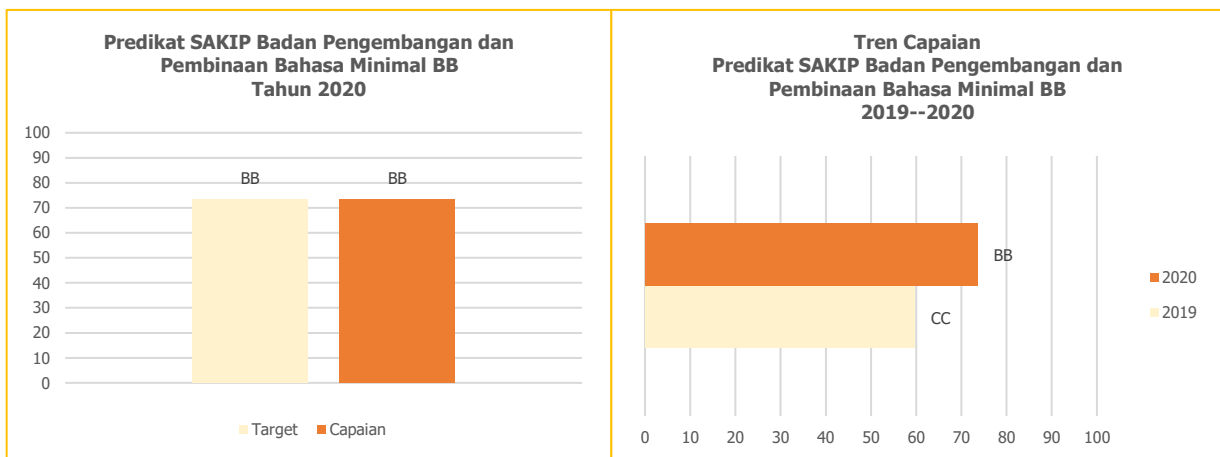
**Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Tahun 2020**

Sejalan dengan hal tersebut, BPP Bahasa menetapkan IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPP Bahasa. Pedoman yang dijadikan acuan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPP Bahasa yaitu Juknis SAKIP di Lingkungan Kemdikbud. Juknis tersebut memuat langkah-langkah penyelenggaraan SAKIP secara terperinci. Selain itu, Juknis SAKIP memuat tata cara evaluasi SAKIP dengan menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE). KKE ini digunakan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal untuk mengevaluasi seluruh satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kemdikbud. Skor yang diperoleh melalui KKE itulah yang digunakan sebagai acuan BPP Bahasa dalam menentukan capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB. IKP tersebut dihitung melalui rata-rata skor yang diperoleh oleh 33 satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa. Berikut ini tabel capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020.



**Tabel 20**  
**Target dan Realisasi Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan**  
**Pembinaan Bahasa Minimal BB**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
					Target	Realisasi	%	
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	CC	BB	BB	100	BB



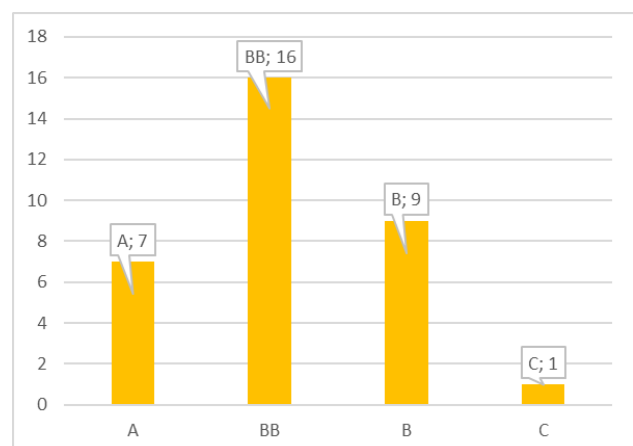
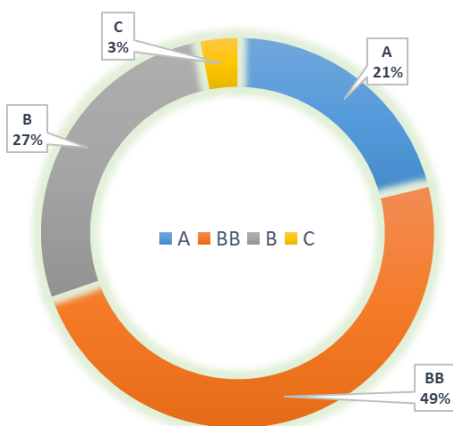
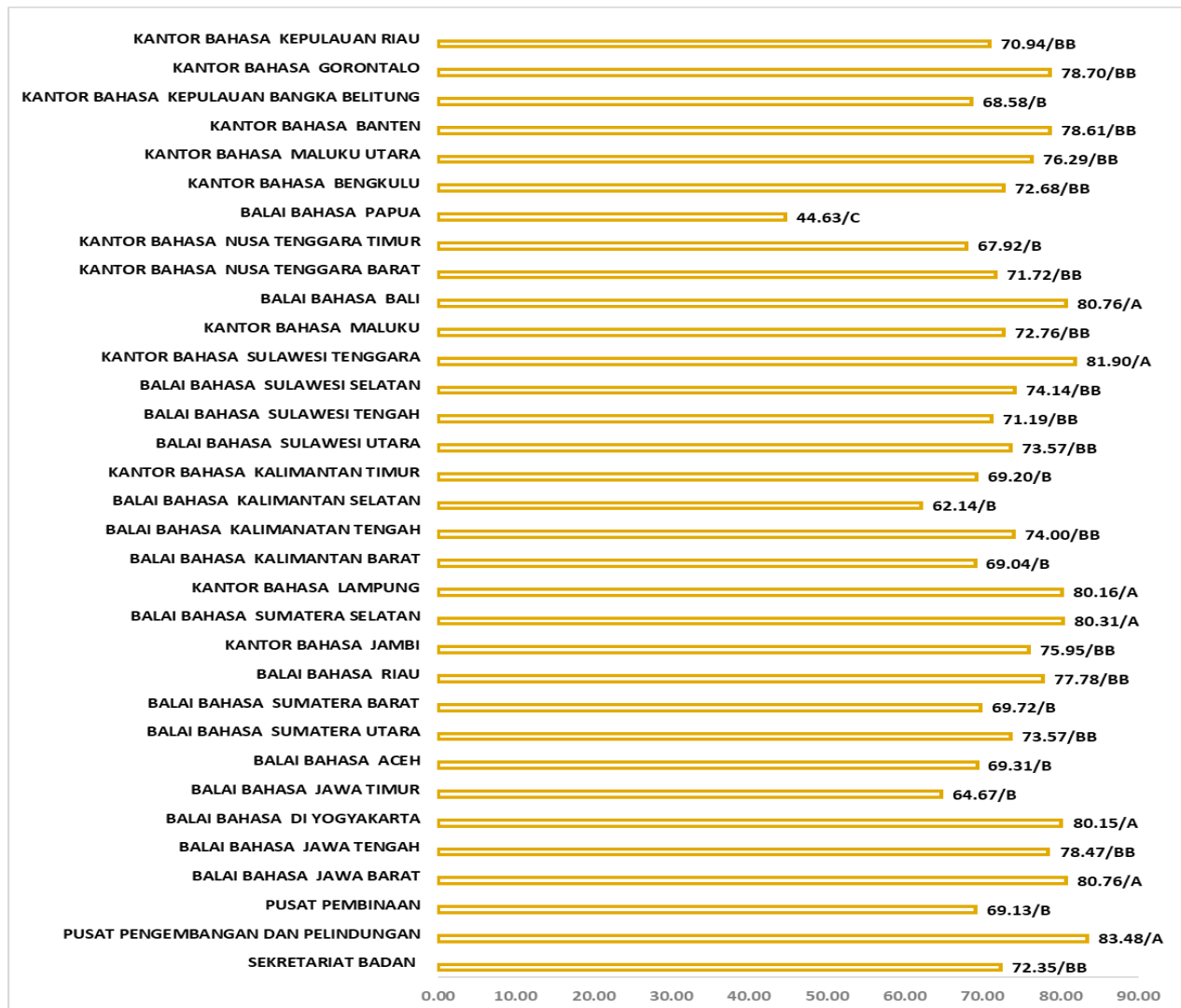
IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB tingkat capaiannya telah mencapai terget yang ditetapkan. Rata-Rata Predikat SAKIP Satker pada tahun 2020 ditargetkan memperoleh nilai BB/sangat memuaskan dengan nilai 73,56. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata yang diperoleh pada 2019 dengan nilai 59,75, nilai SAKIP BPP Bahasa meningkat dengan signifikan. Pencapaian itu diperoleh dari hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kertas Kerja Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pada tahun 2020 di lingkungan Badan Pengembangan dan



Pembinaan Bahasa dilaksanakan pada bulan November 2020. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai yang diraih oleh 33 satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada grafik berikut.

### Penilaian Akuntabilitas Kinerja Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020



Dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, jumlah satker yang memperoleh nilai C sebanyak satu satker, nilai B sebanyak sembilan satker, nilai BB sebanyak enam belas satker, dan nilai A sebanyak tujuh satker, sehingga dirata-ratakan hasil nilai akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, memperoleh nilai BB dengan skor nilai 73,56 dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen.

Adapun rincian nilai per komponen dan catatan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut.

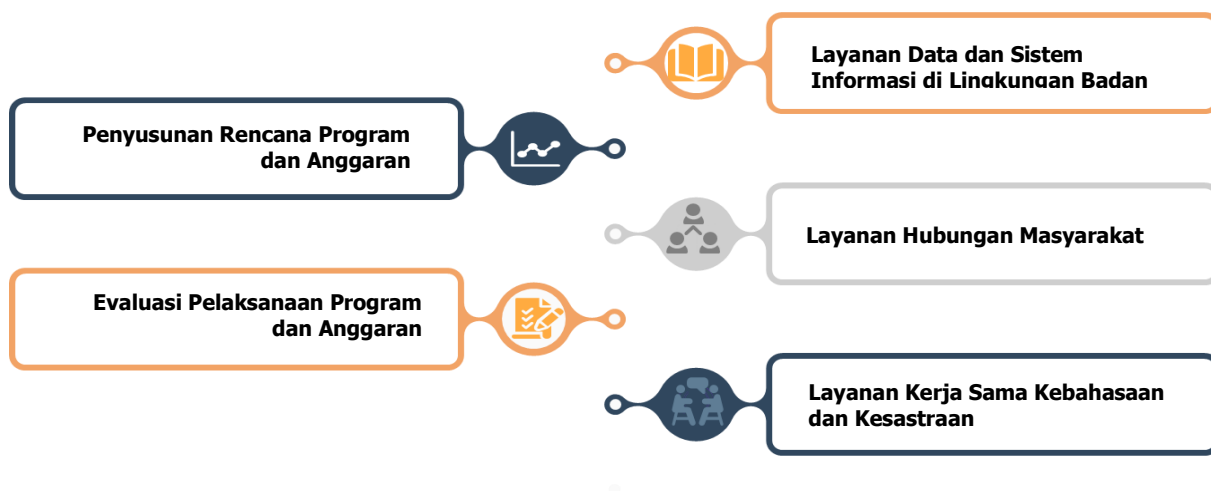
**Tabel 21**  
**Rincian Nilai Per Komponen dan Catatan Rekomendasi**

Komponen	Skor	Catatan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	19,45	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan. Rumusan Indikator Tujuan dan Target dapat mengacu pada Indikator Kinerja (IKSS) dan target Indikator Kinerja (target IKSS pada akhir periode Renstra) pada unit kerja di atasnya.</li> <li>2. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut.</li> <li>3. Rencana Aksi agar mencantumkan kegiatan/komponen rinci pada masing-masing indikator kinerja setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.</li> <li>4. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK.</li> </ol>
Pengukuran Kinerja	22,60	Penyusunan Indikator kinerja individu (Perjanjian Kinerja Individu) agar mengacu pada Indikator kinerja satuan kerja/unit kerjanya ( <i>cascading</i> /turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja).
Pelaporan Kinerja	10,50	Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Unit Utama untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.
Evaluasi Kinerja	2,20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/penanggungjawab kegiatan.</li> <li>2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan SAKIP di masa yang akan datang.</li> </ol>



Komponen	Skor	Catatan Rekomendasi
Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	18,75	Unit utama agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB didukung oleh komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut.



Melihat hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2020, capaian target IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB dapat dicapai dengan baik. Meskipun demikian, dalam upaya pencapaian target tersebut, BPP Bahasa masih menemui kendala atau hambatan. Berikut ini hambatan, langkah antisipasi, dan strategi pencapaiannya.

**Tabel 22**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi**  
**IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengimplementasikan SAKIP.	1. Melakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja satker secara serentak.	Melakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja satker secara serentak.
	2. Melibatkan pimpinan satuan kerja dalam evaluasi SAKIP.	Melibatkan pimpinan satuan kerja dalam evaluasi SAKIP.
	3. Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis satuan kerja.	Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis satuan kerja.
2. Kurangnya kepedulian dan dukungan sebagian pegawai	Melakukan pendampingan evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan	Melakukan pendampingan evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan



Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
dalam mengimplementasikan SAKIP.	BPP Bahasa dengan melibatkan seluruh pegawai.	BPP Bahasa dengan melibatkan seluruh pegawai.
3. Kekurangan dokumen pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja.	1. Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.	Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.
	2. Melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.	Melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.
	3. Melakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Melakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
4. Belum seluruh satker membentuk tim SAKIP.	Mewajibkan seluruh satuan kerja membentuk tim SAKIP	Mewajibkan seluruh satuan kerja membentuk tim SAKIP

### **Indikator Kinerja Program 5.2: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat ini terpacu untuk berkompetisi saling menunjukkan kinerja yang terbaik kepada publik. Kompetisi yang sehat dan positif antar-Kementerian/Lembaga menimbulkan banyak indikator yang menjadi barometer bagi instansi pemerintah bertata kelola baik. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah Opini Laporan Keuangan, skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan pelayanan publik, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

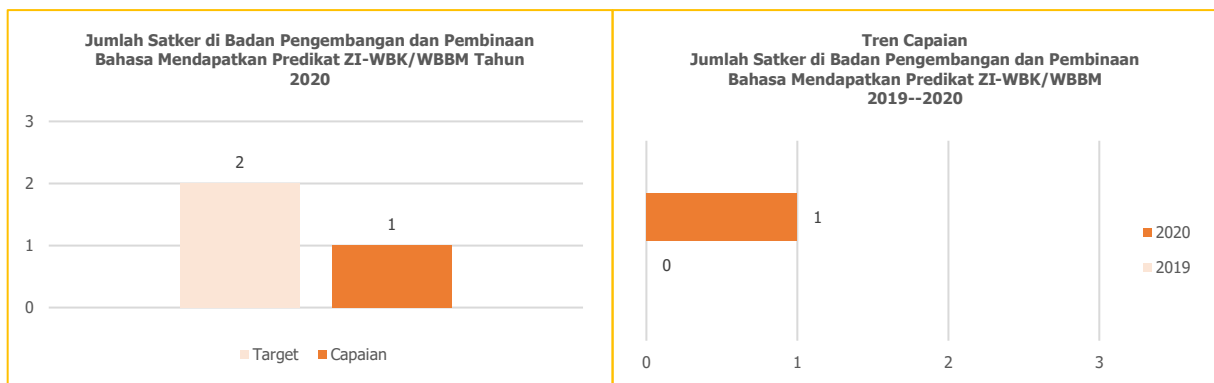
Atas dasar itulah, BPP Bahasa menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi menjadi indikator kinerja program, yaitu Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. IKP tersebut sejalan dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman



Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berikut ini Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

**Tabel 23**  
**Target dan Realisasi Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**

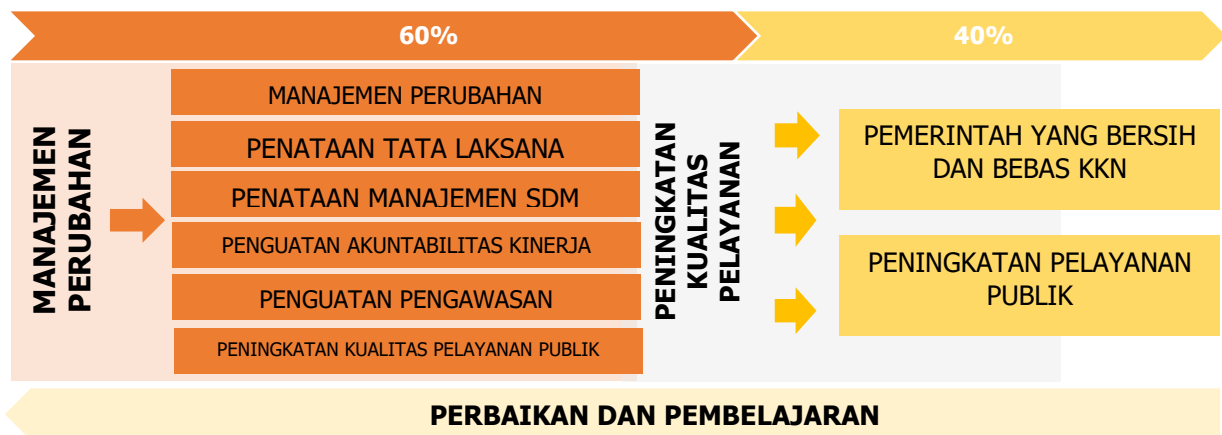
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	Tahun 2020			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	0	2	1	50	8



Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap satuan kerja yang berpotensi sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Kelompok kerja/tim mengusulkan satuan kerja hasil identifikasi kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon satuan kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Calon tersebut dinilai secara mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). TPI melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Badan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Satuan kerja yang diusulkan dan dinilai memenuhi syarat serta dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.



Satuan kerja yang sudah ditetapkan harus memenuhi dua jenis komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Berikut ini model yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang dipilih untuk dinilai sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dalam komponen hasil pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN  
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
  - b. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat



Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Berikut ini rincian komponen pengungkit, komponen hasil, dan bobot penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

**Tabel 24**  
**Komponen Pengungkit, Komponen Hasil, dan Bobot Penilaian**

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Manajemen Perubahan	5%	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Penataan Tata Laksana	5%	2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%			
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%			
5	Penguatan Pengawasan	15%			
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%			

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai koordinator pelaksanaan ZI-WBK di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan pendampingan dan reviu atas lembar kerja evaluasi WBK berdasarkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Pada Tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 (Corona), pendampingan dan reviu dilakukan melalui pertemuan daring dengan tujuan satuan kerja yang diusulkan memiliki persiapan yang maksimal baik dari data dukung maupun sarana dan prasarana penunjang penilaian tersebut.

Hasil reviu oleh Tim RBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan direviu oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dengan metode pendampingan melalui daring dengan melibatkan Tim RBI dari BPP Bahasa. Pada tahap ini, dari enam satuan kerja yang diusulkan hanya empat satuan



kerja yang lolos ke tahap penilaian selanjutnya. Adapun satuan kerja yang tidak lolos pada tahap PMPZI yaitu:

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dikarenakan salah satu komponen syarat minimal tidak terpenuhi;
2. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dikarenakan salah satu komponen syarat minimal tidak terpenuhi.

Proses penilaian satuan kerja sebagai satuan kerja WBK sudah memasuki tahap Tim Penilai Nasional (TPN) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Pada tahap ini, Kemenpan RB melakukan survei internal dan survei eksternal. Survei internal dilaksanakan kepada ASN satuan kerja yang terkait dengan jumlah yang ditetapkan oleh TPN dan menitikberatkan pada pemahaman terkait integritas jabatan dan evaluasi organisasi. Untuk survei eksternal dilaksanakan pada masyarakat pengguna layanan pada tiap satuan kerja terkait dengan jumlah yang ditetapkan oleh TPN. Pada tahap ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak lolos dikarenakan hasil survei eksternal tidak mencapai hasil minimal yang ditetapkan oleh TPN KemenpanRB.

Dari semua tahapan penilaian satuan kerja sebagai satuan kerja WBK yang telah dilaksanakan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja yang diusulkan sebagai satuan kerja WBK di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dari semula enam satuan kerja yang dilakukan pembinaan, sampai pada tahap TPN tersisa tiga satuan kerja yang lolos yaitu 1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 3) Balai Bahasa Provinsi Bali.

Pada saat penetapan predikat WBK yang tiap tahun dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, dari tiga satuan kerja tersebut hanya satu satuan kerja yang menerima predikat WBK dari Kemenpan RB yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.



Pelayanan terhadap masyarakat menjadi salah satu fokus pelaksanaan ZI-WBK dengan melakukan peningkatan kualitas layanan dengan memunculkan inovasi. Berikut ini peningkatan layanan atau inovasi terkait layanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sehingga menerima predikat WBK beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pada layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia terdapat laman portal pelaporan data satu pintu sehingga memudahkan peserta untuk mengikuti UKBI standar berbasis luring dan daring, serta sertifikat hasil UKBI diserahkan maksimal setelah tiga hari kerja.
2. Pada layanan ahli bahasa bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan laman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/home.php> dan melalui kelas daring, serta konsultasi kebahasaan yang akan dijawab dalam waktu 1x24 jam.



3. Pada layanan penerjemahan dapat mengajukan permohonan melalui <https://rumahpusbin.kemdikbud.go.id/formlayanan.php>. selain itu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra juga mengadakan kegiatan penerjemahan dengan mengakomodasi peserta tuli, menyediakan juru bahasa isyarat serta menyediakan penjurubahasa jarak jauh.

Dalam upaya pencapaian target IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM terdapat kendala atau hambatan yang ditemui, di antaranya adalah sebagai berikut.



**Tabel 25**  
**Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi**  
**IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM**

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Belum adanya kesepahaman pada satuan kerja yang ditunjuk terkait data dukung lembar kerja evaluasi ZI-WBK.	Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.	Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.
2. Standar minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja dalam pemenuhan layanan belum seragam.	Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.	Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.



## **B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

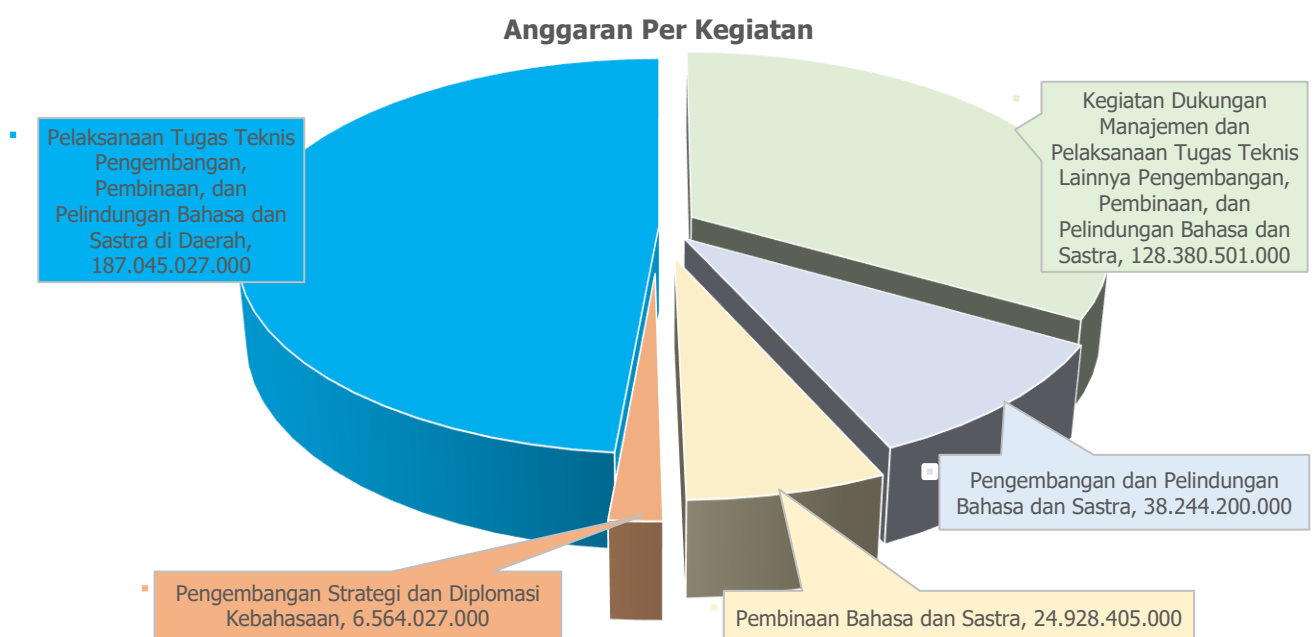
BPP Bahasa pada Tahun Anggaran 2020 memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp385.162.160.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)**. Anggaran tersebut didistribusikan ke lima kegiatan yang ada pada BPP Bahasa. Berikut rincian pagu anggaran untuk lima kegiatan tersebut.

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp128.380.501.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah).

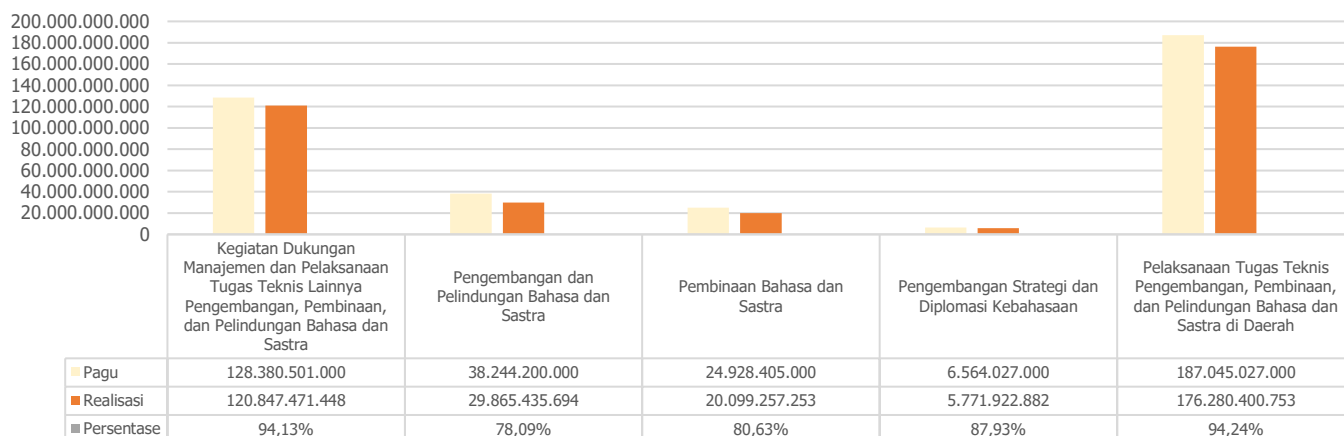


2. Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp38.244.200.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
3. Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar Rp24.928.405.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).
4. Kegiatan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan sebesar Rp6.564.027.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah)
5. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah sebesar Rp187.045.027.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Anggaran terbesar yang terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp79.454.258.171.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Berikut ini secara rinci sandingan pagu dan realisasi anggaran per kegiatan.



### Pagu, Realisasi, dan Persentase Anggaran Per Kegiatan



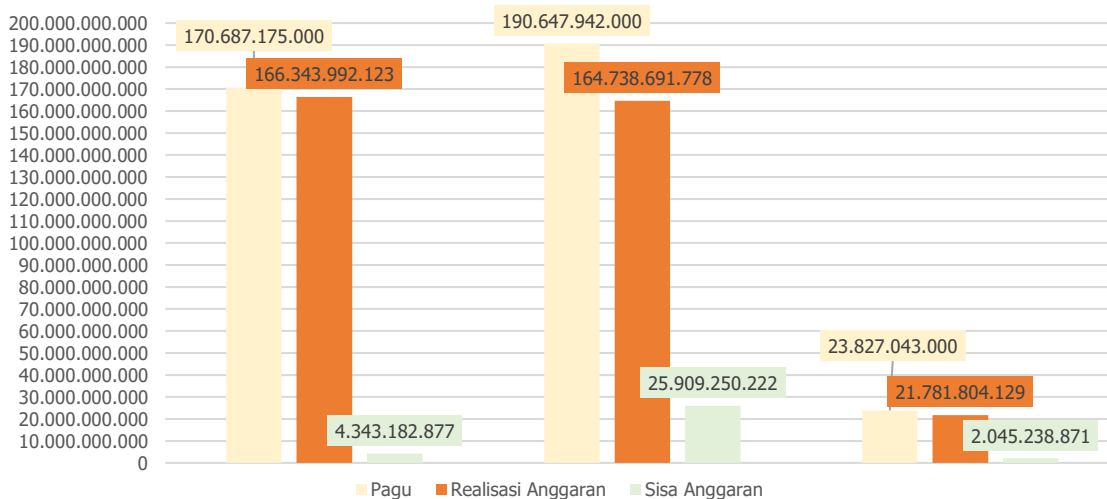
## 1. Realisasi Per Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp352.864.488.030,00 atau 91,61% dari anggaran belanja sebesar Rp385.162.160.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 26**  
**Pagu, Realisasi, dan Sisa Anggaran Per Belanja**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
Pegawai	170.687.175.000	166.343.992.123	4.343.182.877	97,46%
Barang	190.647.942.000	164.738.691.778	25.909.250.222	86,41%
Modal	23.827.043.000	21.781.804.129	2.045.238.871	91,42%
<b>Total</b>	<b>385.162.160.000</b>	<b>352.864.488.030</b>	<b>32.297.671.970</b>	<b>91,61%</b>

### Pagu dan Realisasi Per Belanja



Berikut ini pagu dan realisasi anggaran per satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020.

**Tabel 27**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satker**  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
<b>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>					
<b>Pusat</b>					
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	128.380.501.000	120.847.471.448	94,13	7.533.029.552
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	38.244.200.000	29.865.435.694	78,09	8.378.764.306
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	24.928.405.000	20.099.257.253	80,63	4.829.147.747
4	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	6.564.027.000	5.771.922.882	87,93	792.104.118
<b>30 UPT (Balai/Kantor Bahasa)</b>					
1	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	6.863.959.000	6.554.141.835	95,49	309.817.165
2	Balai Bahasa Provinsi Bali	8.403.800.000	7.428.776.791	88,4	975.023.209
3	Balai Bahasa Provinsi Aceh	6.007.512.000	5.526.431.718	91,99	481.080.282
4	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	7.305.712.000	6.783.673.281	92,85	522.038.719
5	Balai Bahasa Provinsi Riau	7.490.975.000	7.438.281.101	99,3	52.693.899
6	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	6.531.532.000	5.956.195.934	91,19	575.336.066
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	6.875.192.000	6.297.842.629	91,6	577.349.371
8	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	8.977.277.000	8.532.134.001	95,04	445.142.999
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	8.153.602.000	8.035.848.664	98,56	117.753.336
10	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	8.049.301.000	7.623.981.628	94,72	425.319.372
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	6.368.859.000	5.772.216.731	90,63	596.642.269
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	6.545.110.000	6.519.269.101	99,61	25.840.899
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	6.242.793.000	6.092.936.226	97,6	149.856.774
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	6.238.003.000	5.416.754.911	86,83	821.248.089
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	4.867.627.000	4.472.447.757	91,88	395.179.243
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	8.534.114.000	8.221.625.061	96,34	312.488.939
17	Balai Bahasa Provinsi Papua	10.421.513.000	9.229.984.783	88,57	1.191.528.217
18	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	5.754.759.000	5.426.657.586	94,3	328.101.414



No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
19	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	4.346.192.000	3.966.757.858	91,27	379.434.142
20	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	4.095.882.000	3.832.019.587	93,56	263.862.413
21	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.871.105.000	2.757.850.530	96,06	113.254.470
22	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	6.382.359.000	5.973.107.293	93,59	409.251.707
23	Kantor Bahasa Provinsi Banten	3.479.913.000	3.415.010.180	98,13	64.902.820
24	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	5.792.869.000	5.642.978.594	97,41	149.890.406
25	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.500.225.000	6.368.395.229	97,97	131.829.771
26	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.516.773.000	4.447.984.978	98,48	68.788.022
27	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	6.170.726.000	5.901.475.284	95,64	269.250.716
28	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	4.278.144.000	4.084.961.968	95,48	193.182.032
29	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	4.434.071.000	4.324.432.729	97,53	109.638.271
30	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	4.545.128.000	4.236.226.785	93,2	308.901.215

## 2. Realisasi Per *Output*

Pada tahun 2020, Dana DIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebesar Rp385.162.160.000.000,00. Realisasi anggaran sampai pada akhir tahun anggaran sebesar Rp352.864.488.030.000,00 dengan sisa Rp32.297.671.970.000,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 91,61%. Berikut ini pagu dan realisasi anggaran per *output* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020.

**Tabel 28**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Per *Output***  
**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020**

No	Nama <i>Output</i>	Total (Dalam Ribuan Rupiah)			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2020.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	26.501.040.000	22.749.084.304	85,84%	3.751.955.696
2	2020.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.638.280.000	9.800.206.256	84,21%	1.838.073.744
3	2020.994 Layanan Perkantoran	90.241.181.000	88.298.180.888	97,85%	1.943.000.112
4	2021.002 Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa	2.571.093.000	1.976.068.036	76,86%	595.024.964
5	2021.003 Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	194.573.000	130.526.700	67,08%	64.046.300



No	Nama Output	Total (Dalam Ribuan Rupiah)			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
6	2021.004 Kamus dan Pengembangan Istilah	1.245.760.000	700.767.494	56,25%	544.992.506
7	2021.005 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian	4.231.693.000	2.263.134.298	53,48%	1.968.558.702
8	2021.007 Lembaga Kebahasaan Terfasilitasi	965.924.000	634.838.631	65,72%	331.085.369
9	2021.008 Sastra Berkembangkan	598.933.000	442.144.578	73,82%	156.788.422
10	2021.009 Bahasa Terlindungi	1.498.453.000	1.061.112.221	70,81%	437.340.779
11	2021.010 Sastra Terlindungi	1.348.709.000	1.102.538.864	81,75%	246.170.136
12	2021.011 Bahan Ajar Kemahiran Berbahasa	1.182.916.000	868.256.450	73,40%	314.659.550
13	2021.012 Bahan Pengayaan Laboratorium Bahasa dan Sastra	498.805.000	242.332.350	48,58%	256.472.650
14	2021.013 Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	6.017.060.000	5.518.864.262	91,72%	498.195.738
15	2021.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.000.000.000	880.019.521	88,00%	119.980.479
16	2021.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.637.195.000	1.222.788.994	74,69%	414.406.006
17	2021.994 Layanan Perkantoran	15.253.086.000	12.822.043.295	84,06%	2.431.042.705
18	2022.001 Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	1.842.388.000	1.338.419.067	72,65%	503.968.933
19	2022.003 Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	2.635.681.000	1.545.523.549	58,64%	1.090.157.451
20	2022.005 Gerakan Literasi Nasional (GLN)	3.213.958.000	2.716.129.402	84,51%	497.828.598
21	2022.007 Naskah Terjemahan	1.643.690.000	951.821.906	57,91%	691.868.094
22	2022.008 Rekomendasi Kebijakan melalui Penelitian Pembinaan Bahasa dan Sastra	2.776.093.000	1.958.299.869	70,54%	817.793.131
23	2022.009 Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	365.912.000	119.991.400	32,79%	245.920.600
24	2022.010 Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	4.303.807.000	3.809.153.630	88,51%	494.653.370
25	2022.011 Pemelajar Bahasa Asing	259.275.000	199.203.353	76,83%	60.071.647
26	2022.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.004.073.000	819.803.150	81,65%	184.269.850
27	2022.994 Layanan Perkantoran	6.883.528.000	6.640.911.927	96,48%	242.616.073
28	5288.009 Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	4.299.387.000	3.507.291.132	81,58%	792.095.868
29	5288.994 Layanan Perkantoran	2.264.640.000	2.264.631.750	100,00%	8.250
30	5289.002 Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	10.379.307.000	9.539.276.503	91,91%	840.030.497
31	5289.005 Bahasa Terlindungi	4.512.823.000	4.151.241.284	91,99%	361.581.716



No	Nama Output	Total (Dalam Ribuan Rupiah)			
		Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
32	5289.006 Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	11.055.090.000	10.425.063.838	94,30%	630.026.162
33	5289.008 Sastra Terlindungi	4.830.504.000	4.495.590.890	93,07%	334.913.110
34	5289.010 Kamus dan Pengembangan Istilah	3.190.291.000	2.812.999.856	88,17%	377.291.144
35	5289.011 Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra	7.406.625.000	6.709.439.633	90,59%	697.185.367
36	5289.012 Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah	10.266.153.000	9.614.803.360	93,66%	651.349.640
37	5289.013 Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	10.887.551.000	10.125.047.177	93,00%	762.503.823
38	5289.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.196.953.000	11.109.318.352	99,22%	87.634.648
39	5289.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	11.648.458.000	10.284.721.304	88,29%	1.363.736.696
40	5289.994 Layanan Perkantoran	101.671.272.000	97.012.898.556	95,42%	4.658.373.444
<b>Total</b>		<b>385.162.160.000</b>	<b>352.864.488.030</b>	<b>91,61%</b>	<b>32.297.671.970</b>

### 3. Realisasi Per Sasaran Program

Berikut ini pagu dan realisasi anggaran per Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020.

**Tabel 29**  
**Pagu dan Realisasi Per Sasaran Program**

Sasaran Program	Pagu	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	67.825.448.000	58.184.364.113	85,79
Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	4.419.783.000	2.910.121.775	65,84
Meningkatnya Budaya Literasi	20.196.047.000	17962067470	88,94
Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	11.781.176.000	9.903.326.375	84,06
Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	278.675.066.000	261.645.132.211	93,89

### 4. Efisiensi Anggaran

Secara umum, capaian delapan indikator tidak seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari delapan indikator, terdapat satu indikator yang tidak mencapai 100%, yaitu: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Dua indikator tercapai 100%, yaitu Jumlah Negara yang Mengajarkan bahasa Indonesia dan Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal



BB, lima indikator lainnya lebih dari 100%, yaitu Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji, Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan), Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah, dan Jumlah Pemelajar BIPA. Dari persentase capaian tersebut disandingkan dengan pagu per indikator untuk melihat efisiensi anggaran yang diperoleh BPP Bahasa. Berikut ini sandingannya.

**Tabel 30**  
**Pagu dan Realisasi Per Indikator Kinerja Program**

Indikator Kinerja Program	Pagu	Realisasi	Persentase
Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	54.810.460.000	47.099.564.061	85,93
Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	13.014.988.000	11.084.800.052	85,17
Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	4.419.783.000	2.910.121.775	65,84
Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	20.196.047.000	17.962.067.470	88,94
Jumlah Negara yang Mengajarkan bahasa Indonesia	965.924.000	634.838.631	65,72
Jumlah Pemelajar BIPA	10.815.252.000	9.268.487.744	85,70
Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	25.928.006.000	22.127.519.704	85,34
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	252.747.060.000	239.517.612.507	94,77

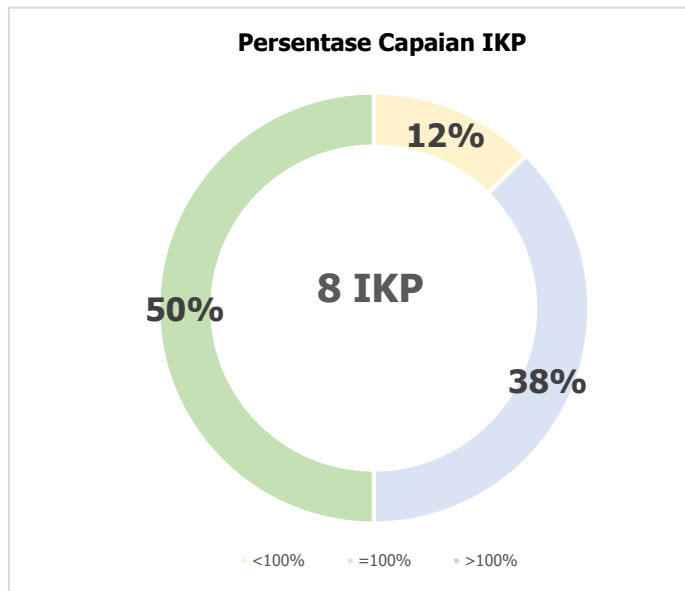
Beberapa indikator yang capaian kinerjanya lebih dari atau sama dengan 100% dan persentase penggunaan anggarannya di bawah 100% dapat dikatakan bahwa BPP Bahasa telah melakukan efisiensi anggaran. BPP Bahasa mengalami empat kali revisi anggaran yang disebabkan oleh beberapa kebijakan nasional, di antaranya efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, pemenuhan pulsa bagi peserta didik, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemenuhan kebutuhan internal, yaitu pengalihan dan penyesuaian belanja pegawai ke UPT dan optimalisasi anggaran belanja barang antarkomponen kegiatan untuk kegiatan peningkatan kompetensi anggota Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP), sehingga anggaran terakhir BPP Bahasa sebesar Rp385.162.160.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh



ribu rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut, BPP Bahasa berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp 352.864.488.030,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) atau 91,61%.



Selama tahun 2020, BPP Bahasa berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Dari delapan indikator, terdapat satu indikator yang tidak mencapai 100% atau sebesar 12% dari 8 IKP, yaitu: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Tiga indikator tercapai 100% atau sebesar 38% dari delapan IKP, yaitu Indeks Daya Hidup Bahasa

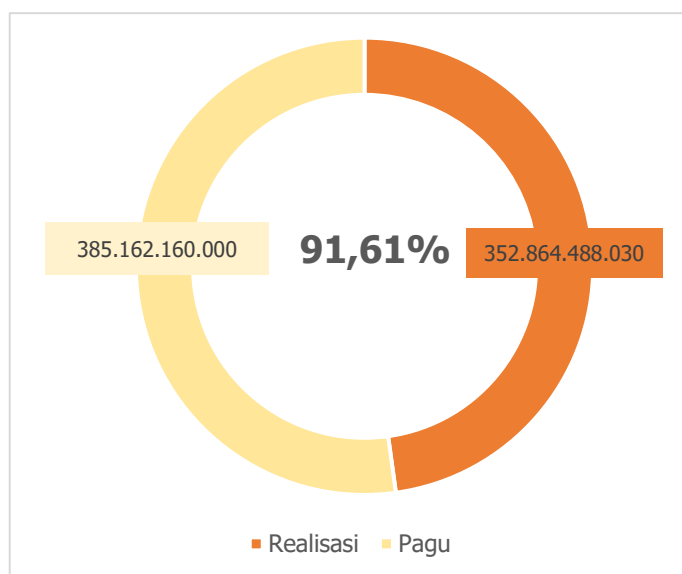
Daerah, Jumlah Negara yang Mengajarkan bahasa Indonesia, dan Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB, empat indikator lainnya lebih dari 100% atau sebesar 50% dari delapan IKP, yaitu Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji, Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan), dan Jumlah Pemelajar BIPA. Berikut ini rekapitulasi target dan realisasi yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja.

**Tabel 31**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesian Mahir Teruji	Persentase	42%	65,8	156,67%
		1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persentase	26%	27,87	107,19%



Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Satuan	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Budaya Literasi	2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	58,2	59.11	100.74%
3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0.55	0,55	100%
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	30	30	100%
		4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	75.865	79.705	105,06
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	Predikat	BB	BB	100%
		5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	1	50%



BPP Bahasa untuk terus berupaya meningkatkan kinerja. Upaya tersebut tentu saja berjalan seiringan dengan upaya optimalisasi anggaran. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian penggunaan anggaran. Hasil upaya tersebut, pada tahun 2020, BPP Bahasa mampu menyerap anggaran 91,61%.



Selain capaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020. BPP Bahasa juga telah melaksanakan program nasional yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan menerbitkan surat edaran bersama. Berikut ini capaian prioritas nasional.

**Tabel 32**  
**Prioritas Nasional**

No	Prioritas Nasional	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	lembaga	2471	2475	100,16	Capaian Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina diperoleh melalui Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, dan Media Massa
2	Kamus dan Pengembangan istilah	lema	28000	24640	88	Capaian Kamus dan Pengembangan istilah diperoleh melalui pemerolehan lema pemutakhiran KBBI; Penyusunan Kamus Bidang Ilmu: Penyuntingan Kamus Etimologi; dan Sidang Komisi Istilah.
3	Rekomendasi Kebijakan melalui Penelitian Bahasa dan Sastra	dokumen	77	77	100	Rekomendasi Kebijakan melalui Penelitian Bahasa dan Sastra diperoleh melalui Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Reksa Bahasa dan Pedoman Krida Bahasa, Jurnal Linguistik Forensik, Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia (Munsi) III
4	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah	orang	14241	14464	101,57	Pelaksanaan GLN di daerah dengan melakukan pembinaan komunitas literasi di sekolah, pelatihan praktik baik literasi kepada guru, dan diksusi daring.
5	Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	Orang	14804	15247	102,99	Pelaksanaan Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra dilakukan melalui Pemilihan Duta Bahasa, Reksa Bahasa, Kelas Daring Pengapresiasi Sastra, dan Bengkel Sastra Daring.
6	Pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing	penugasan	220	221	100,45	Capaian pengajar BIPA di luar negeri masa tugas 2020 terealisasi sebanyak 221 penugasan. Pembelajaran BIPA tersebut dilakukan melalui tatap muka (sebelum pandemi covid-19) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jumlah pemelajar sebanyak 8.840 orang, tersebar di 23 negara, dan 89 lembaga.



No	Prioritas Nasional	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
7	Gerakan Literasi Nasional	Orang	420	558	132,86	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Instruktur Literasi Digital Tingkat Nasional dalam Rangka GLN, Uji Keterbacaan Buku Bacaan ASEAN dalam rangka Gerakan Literasi Nasional, dan Peningkatan Mutu Praktik Baik Pembelajaran Literasi Digital dalam Rangka GLN sebagian besar dilaksanakan secara daring.
8	Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	Orang	5000	6193	123,86	Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Kunjungan ke BPP Bahasa, Bengkel Sastra bagi Siswa, Sastrawan Masuk Sekolah (SMS), Panggung Sastra Siswa Indonesia, Festival Musikalisasi Puisi 2020, Pemilihan Duta Bahasa Tahun 2020, dan Bulan Bahasa dan Sastra 2020 sebagian besar dilaksanakan secara daring
9	Pemelajar Bahasa Asing	Orang	1500	1589	105,93%	Capaian Pemelajar Bahasa Asing diperoleh melalui fasilitasi Kontingen TNI Misi Perdamaian.

Terkait dengan capaian Sasaran Program, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus melakukan inovasi, tidak hanya inovasi di tengah pandemi, tetapi juga untuk meningkatkan akses, memberikan manfaat, serta dampak yang baik kepada masyarakat. Berikut ini inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1. Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) dibentuk untuk meningkatkan layanan yang terkait dengan tugas fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2. Penyusunan UKBI Adaptif.
3. Menerbitkan Politik Bahasa Baru.
4. Menerbitkan Peta Jalan Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan.
5. Menyusun Tata Bahasa Indonesia Kontemporer.
6. Menerbitkan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 Bahasa Daerah (Video Pedoman 3M dan Pesan Ibu).



**Tabel 33**  
**77 Bahasa Daerah yang Digunakan dalam**  
**Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M**

No	Bahasa Daerah	No	Bahasa Daerah	No	Bahasa Daerah
1	Bahasa Buol	27	Bahasa Nias	53	Bahasa Bugis
2	Bahasa Kaili	28	Bahasa Angkola Mandailing	54	Bahasa Makassar
3	Bahasa Pamona	29	Bahasa Pesisir Tapanuli Tengah	55	Bahasa Melayu Jambi
4	Bahasa Taa	30	Bahasa Batak Toba	56	Bahasa Kerinci
5	Bahasa Jawa Dialek Banten	31	Bahasa Sunda	57	Bahasa Rejang
6	Bahasa Sunda Dialek Banten	32	Bahasa Cirebon Indramayu	58	Bahasa Melayu Bengkulu
7	Bahasa Gorontalo	33	Bahasa Tolaki	59	Bahasa Lembak
8	Bahasa Suwawa Gorontalo	34	Bahasa Wolio	60	Bahasa Serawai
9	Kepulauan Riau	35	Bahasa Muna	61	Bahasa Melayu Bangka
10	Bahasa Melayu Dialek Papua	36	Bahasa Kulisusu	62	Bahasa Kutai
11	Bahasa Ambai	37	Bahasa Wakatobi	63	Bahasa Banjar Samarinda Kaltim
12	Bahasa Banjar Kalsel	38	Bahasa Gayo	64	Bahasa Sasak
13	Bahasa Bali	39	Bahasa Aceh	65	Bahasa Samawa
14	Bahasa Komerling	40	Bahasa Melayu Dialek Kampar	66	Bahasa Mbojo
15	Bahasa Melayu Palembang	41	Bahasa Bengkalis	67	Bahasa Melayu Kupang
16	Bahasa Jawa Ragam Krama	42	Bahasa Minangkabau	68	Bahasa Manggarai
17	Bahasa Madura	43	Bahasa Mentawai	69	Bahasa Lamaholot
18	Bahasa Jawa Dialek Surabaya	44	Bahasa Jawa Dialek Tegal	70	Bahasa Dawan
19	Bahasa Dialek A	45	Bahasa Dayak Tamambalo	71	Bahasa Ngada
20	Bahasa Dialek O	46	Bahasa Melayu	72	Bahasa Hitu
21	Bahasa Dayak Ngaju	47	Bahasa Dayak Ahe	73	Bahasa Alune
22	Bahasa Katingan	48	Bahasa Tombulu	74	Bahasa Seram
23	Bahasa Maanyan	49	Bahasa Tondano/Tolour	75	Bahasa Tidore
24	Bahasa Langkat	50	Bahasa Mandar	76	Bahasa Ternate
25	Bahasa Karo	51	Bahasa Mandar	77	Bahasa Melayu Ternate
26	Bahasa Pakpak	52	Bahasa Toraja		

7. Melaksanakan kegiatan pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra dalam bentuk daring.
8. Proyek Percontohan Literasi Geulis (Gerakan untuk Literasi Semesta) di NTB.



# LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**dengan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  
Nadiem Anwar Makarim

Jakarta, 2020  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa,  
  
E. Aminudin Aziz

## TARGET KINERJA

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	42 %
		1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	26 %
2	Meningkatnya Budaya Literasi	2. 1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks 58,2
3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks 0.55
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancan Internasional	4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	30 Negara
		4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	75.865 Orang
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	Predikat BB
		5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2 Satker

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp 150.868.636.000,00
2	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp 44.627.553.000,00
3	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp 28.567.857.000,00
4	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Rp 6.564.027.000,00
5	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	Rp 185.534.087.000,00

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  
Nadiem Anwar Makarim

Jakarta, 2020  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa,  
  
E. Aminudin Aziz

### Pengukuran Kinerja Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kode Sasaran Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Capaian		%
					Volume	Anggaran	Volume	Anggaran	
SP 8.1	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	IKP	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	%	42	54.810.460.000	65,8	47.099.564.061	156,67%
		IKP	Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik	%	26	13.014.988.000	27,87	11.084.800.052	107,19%
SP 8.2	Meningkatnya budaya literasi	IKP	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	indeks	58,2	4.419.783.000	55,91	2.910.121.775	96,07%
SP 8.3	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	IKP	Indeks daya hidup bahasa daerah	indeks	0,55	20.196.047.000	0,55	17.962.067.470	100,00%
SP 8.4	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	IKP	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	negara	30	965.924.000	30	634.838.631	100,00%
		IKP	Jumlah pemelajar BIPA	orang	75.865	10.815.252.000	79.705	9.268.487.744	105,06%
SP 8.5	Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	IKP	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	predikat	BB	25.928.006.000	BB	22.127.519.704	100,00%
		IKP	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	252.747.060.000	1	239.517.612.507	50,00%

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Tanpa Suboutput	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	2.040.117.000	1.975.154.638	96,82%
		Koordinasi Gerakan Literasi Nasional	77.596.000	67.701.815	87,25%
		Layanan Akuntansi dan Pelaporan	1.322.370.000	1.221.344.050	92,36%
		Layanan Barang Milik Negara	1.715.248.000	1.426.655.744	83,17%
		Layanan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan	1.498.042.000	1.301.772.450	86,90%
		Layanan Hubungan Masyarakat	1.697.738.000	1.607.098.150	94,66%
		Layanan Kepegawaian	934.069.000	838.106.150	89,73%
		Layanan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan	157.824.000	145.742.750	92,35%
		Layanan Keuangan	1.171.788.000	1.102.044.800	94,05%
		Layanan Tata Laksana, Hukum, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	623.791.000	433.152.600	69,44%
		Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	7.433.154.000	6.724.159.029	90,46%
		Pengelolaan Perpustakaan	670.850.000	597.124.862	89,01%
		Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.315.294.000	3.150.926.987	73,02%
		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.843.159.000	2.423.290.115	85,23%
Layanan Perkantoran	Tanpa Suboutput	Gaji dan Tunjangan	80.341.445.000	79.449.772.823	98,89%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.899.736.000	8.902.955.623	89,93%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tanpa Suboutput	Gedung dan Bangunan	4.318.800.000	3.354.663.711	77,68%
		Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.710.690.000	1.631.000.000	95,34%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.429.398.000	3.719.375.551	83,97%
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	1.179.392.000	1.095.166.994	92,86%
Total			128.380.501.000	121.167.208.842	94,38%

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Bahan Ajar Kemahiran Berbahasa	Tanpa Suboutput	Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Asing	249.486.000	178.033.550	71,36%
		Penyusunan Bahan Ajar BIPA	933.430.000	690.222.900	73,94%
Bahan Pengayaan Laboratorium Bahasa dan Sastra	Tanpa Suboutput	Pengayaan Bahan Laboratorium	422.517.000	236.557.350	55,99%
		Penyusunan Model Simulasi Kebahasaan	76.288.000	5.775.000	7,57%
Bahasa Terlindungi	Bahasa Terkonservasi dan Terevitalisasi	Pemetaan Bahasa	444.316.000	369.828.401	83,24%
		Pengolahan Hasil dan Penyusunan Bahan Rekomendasi Kebijakan Konservasi dan Revitalisasi Bahasa	115.865.000	48.805.000	42,12%
		Pengonservasian dan Perevitalisasian Bahasa	186.044.000	24.200.000	13,01%
		Persiapan Konservasi dan Revitalisasi Bahasa	719.758.000	599.178.820	83,25%
		Semiloka Hasil Konservasi dan Revitalisasi Bahasa	32.470.000	19.100.000	58,82%
Fasilitasi Pengembangan dan Pelindungan	Tanpa Suboutput	Fasilitasi Lembaga Akses Diplomasi Kebahasaan	758.476.000	470.974.195	62,09%
		Fasilitasi Lembaga Pengembangan dan Pelindungan Bahasa	207.448.000	163.864.436	78,99%
Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa	Tanpa Suboutput	Inventarisasi dan Pengolahan Bahan Soal UKBI	36.430.000	27.919.000	76,64%
		Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem UKBI	195.140.000	35.211.816	18,04%
		Penyusunan Soal UKBI	93.900.000	67.628.000	72,02%
		Sidang Pembakuan	403.132.000	331.375.100	82,20%
		Uji Coba Soal UKBI	1.747.546.000	1.449.734.120	82,96%
		Validasi Soal UKBI	94.945.000	64.200.000	67,62%
Kamus dan Pengembangan Istilah	Pengembangan Kamus	Integrasi Produk Bahasa dan Sastra dengan TIK	143.522.000	54.918.940	38,27%
		Pelaporan Pengembangan Kamus	5.480.000	3.260.000	59,49%
		Pemutakhiran Kamus	66.700.000	10.480.000	15,71%
		Penyusunan Kamus	379.800.000	333.933.160	87,92%
		Persiapan Penyusunan Kamus	37.540.000	32.418.870	86,36%
	Pengembangan Kosakata	Pelaksanaan Pengembangan Kosakata	600.737.000	254.710.854	42,40%
		Pelaporan Pengembangan Kosakata	1.500.000	1.475.000	98,33%
Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Tanpa Suboutput	Pengumpulan Data Pedoman dan Standar Kebahasaan dan Kesastraan	32.328.000	20.770.200	64,25%
		Penyusunan Pedoman dan Standar Kebahasaan dan Kesastraan	162.245.000	109.756.500	67,65%
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	Tanpa Suboutput	Pembekalan Calon Pengajar BIPA	272.055.000	187.365.205	68,87%
		Penugasan Pengajar BIPA	5.535.009.000	5.156.519.407	93,16%
		Seleksi Pengajar BIPA	209.996.000	174.979.650	83,33%

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian	Tanpa Suboutput	Penelitian Bidang Kebahasaan	2.075.192.000	756.339.620	36,45%
		Penelitian Bidang Kesastraan	1.248.416.000	920.812.595	73,76%
		Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	898.085.000	585.982.083	65,25%
		Seminar Hasil Penelitian	10.000.000	-	0,00%
Sastra Berkembangkan	Alih Wahana Karya Sastra	Pelaporan Alih Wahana Karya Sastra	1.500.000	-	0,00%
		Penyusunan Alih Wahana Karya Sastra	295.350.000	258.590.558	87,55%
		Persiapan Alih Wahana Karya Sastra	6.650.000	346.000	5,20%
	Kritik Sastra	Pelaporan Kritik Sastra	11.765.000	2.516.400	21,39%
		Penyusunan Kritik Sastra	271.368.000	172.466.280	63,55%
		Persiapan Kritik Sastra	12.300.000	8.225.340	66,87%
Sastra Terlindungi	Sastra Terkonservasi dan Terevitalisasi	Pemetaan Sastra	835.635.000	705.776.480	84,46%
		Pengonservasian dan Perevitalisasian Sastra	390.630.000	322.087.384	82,45%
		Persiapan Pelaksanaan Pelindungan Sastra	62.759.000	39.920.000	63,61%
		Registrasi Hasil Pelindungan Sastra	3.535.000	-	0,00%
		Seminar Nasional Hasil Konservasi dan Revitalisasi Sastra	56.150.000	34.755.000	61,90%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tanpa Suboutput	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	202.387.000	189.277.200	93,52%
		Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	496.835.000	338.753.302	68,18%
		Pengelolaan kepegawaian	465.322.000	305.817.680	65,72%
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	297.620.000	263.455.558	88,52%
		Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	175.031.000	125.485.254	71,69%
Layanan Perkantoran	Tanpa Suboutput	Gaji dan Tunjangan	9.658.999.000	9.372.378.628	97,03%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.594.087.000	3.378.670.331	60,40%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tanpa Suboutput	Gedung dan Bangunan	199.900.000	198.110.022	99,10%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	459.090.000	422.028.999	91,93%
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	341.010.000	161.887.000	47,47%
Total			38.244.200.000	29.696.447.858	77,65%

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	Tanpa Suboutput	Fasilitasi Mitra Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan	464.035.000	351.771.750	75,81%
		Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan bagi Penggiat Bahasa dan Sastra	2.748.807.000	2.513.925.080	91,46%
		Penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra	1.090.965.000	960.889.300	88,08%
Gerakan Literasi Nasional (GLN)	Tanpa Suboutput	Fasilitasi Penguatan Pembelajaran Literasi Baca-Tulis	1.267.353.000	1.190.708.382	93,95%
		Penyusunan Bahan Penguatan Gerakan Literasi Nasional (GLN)	1.946.605.000	1.649.295.600	84,73%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tanpa Suboutput	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	39.850.000	17.890.000	44,89%
		Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	793.354.000	736.900.150	92,88%
		Pengelolaan kepegawaian	75.380.000	29.540.000	39,19%
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	60.930.000	30.753.700	50,47%
		Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	34.559.000	4.719.300	13,66%
Layanan Perkantoran	Tanpa Suboutput	Gaji dan Tunjangan	5.546.408.000	5.382.645.034	97,05%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.337.120.000	1.297.284.454	97,02%
Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	Lembaga Pemerintah Pengguna Bahasa	Aksi Perubahan Pengutamaan Bahasa Negara	89.562.000	53.745.400	60,01%
		Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Lembaga Pemerintah	193.965.000	158.416.000	81,67%
	Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina	Aksi Perubahan Pengutamaan Bahasa Negara	1.168.019.000	776.611.050	66,49%
		Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Pada Lembaga Swasta	736.210.000	475.702.499	64,62%
	Media Massa (Cetak, Elektronik, dan Daring) Terbina dalam Penggunaan	Bahan Pembinaan di Media Massa Cetak, Elektronik, dan Daring	236.070.000	37.338.000	15,82%
		Fasilitasi Pembinaan Bahasa di Media Massa Cetak, Elektronik, dan Daring	211.855.000	106.272.200	50,16%
Naskah Terjemahan	Tanpa Suboutput	Pelaksanaan Penerjemahan	1.442.040.000	863.373.900	59,87%
		Peningkatan Kemahiran Berbahasa Asing untuk Misi Perdamaian	256.025.000	199.203.353	77,81%
		Peningkatan Kemahiran Berbahasa Asing untuk Pengajar	3.250.000	-	0,00%
		Seleksi Bahan Terjemahan	201.650.000	92.365.600	45,80%
Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian	Tanpa Suboutput	Penelitian Bidang Kebahasaan	2.776.093.000	2.187.189.617	78,79%
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tanpa Suboutput	Peningkatan Apresiasi Sastra Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	224.250.000	203.560.560	90,77%
		Peningkatan Kemahiran Berbahasa Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Kebahasaan dan Kesastraan	1.284.825.000	1.106.199.950	86,10%
		Penyusunan Bahan Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa dan Sastra	333.313.000	180.372.020	54,11%
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tanpa Suboutput	Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	365.912.000	119.991.400	32,79%
<b>Total</b>			<b>24.928.405.000</b>	<b>20.726.664.299</b>	<b>83,14%</b>

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	Tanpa Suboutput	Penugasan Pengajar BIPA	4.299.387.000	4.299.386.482	100,00%
		Gaji dan Tunjangan	1.525.103.000	1.525.100.561	100,00%
Layanan Perkantoran	Tanpa Suboutput	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	739.537.000	739.531.189	100,00%
		<b>Total</b>	<b>6.564.027.000</b>	<b>6.564.018.232</b>	<b>100,00%</b>

### Realisasi Anggaran Per-Komponen Balai/Kantor di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
Bahasa Terlindungi	Tanpa Suboutput	Konservasi Bahasa	1.639.139.000	1.358.171.571	82,86%
		Pemetaan Bahasa	1.325.705.000	1.205.294.306	90,92%
		Revitalisasi Bahasa	1.547.979.000	1.381.339.157	89,24%
Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	Duta Bahasa	Pemilihan Duta Bahasa	1.130.664.000	1.034.641.549	91,51%
		Santi Aji Duta Bahasa	3.477.045.000	3.041.935.540	87,49%
	Reksa Bahasa	Evaluasi Kinerja Reksa Bahasa	412.654.000	387.632.540	93,94%
		Implementasi Kurikulum Reksa Bahasa	5.739.036.000	4.667.457.300	81,33%
		Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Bahasa dan Sastra	128.152.000	113.148.500	88,29%
Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah	Tanpa Suboutput	Pembinaan Komunitas Literasi	3.668.533.000	2.651.499.665	72,28%
		Praktik Baik Literasi	6.597.620.000	5.345.015.118	81,01%
Kamus dan Pengembangan Istilah	Tanpa Suboutput	Integrasi Produk Bahasa dan Sastra dengan TIK	384.149.000	310.357.330	80,79%
		Pengembangan Kamus	615.011.000	544.754.725	88,58%
		Pengembangan Kosakata	2.191.131.000	1.735.550.901	79,21%
Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	Lembaga Pemerintah Pengguna Bahasa Terbina	Aksi Perubahan Pengutamaan Bahasa Negara	1.841.231.000	1.655.771.162	89,93%
		Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Lembaga Pemerintah	1.925.713.000	1.660.062.794	86,21%
		Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pengguna Bahasa	1.573.827.000	1.253.465.185	79,64%
	Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina	Aksi Perubahan Pengutamaan Bahasa Negara	1.014.443.000	867.451.809	85,51%
		Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Pada Lembaga Swasta	857.039.000	753.620.315	87,93%
		Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pengguna Bahasa	728.545.000	537.960.054	73,84%
	Media Massa di Daerah (Cetak, Elektronik, dan Daring) Terbina	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Media Massa	135.188.000	130.265.000	96,36%
		Penghargaan bagi Media Massa	30.000.000	28.350.000	94,50%
	Media Massa di Daerah (Cetak, Elektronik, dan Daring) Terbina dalam Penggunaan Bahasa	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Media Massa	1.450.151.000	1.143.776.678	78,87%
		Penghargaan bagi Media Massa	744.505.000	604.517.144	81,20%
		Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara	78.665.000	27.512.221	34,97%
Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra	Tanpa Suboutput	Jurnal Bahasa dan Sastra	4.137.452.000	3.519.331.847	85,06%
		Penelitian Bidang Kebahasaan	1.753.096.000	1.291.358.165	73,66%
		Penelitian Bidang Kesastraan	1.493.357.000	1.191.270.039	79,77%
		Penelitian Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	22.720.000	22.540.000	99,21%
Sastra Terlindungi	Tanpa Suboutput	Konservasi Sastra	1.447.936.000	1.333.484.517	92,10%
		Pemetaan Sastra	1.241.081.000	1.101.625.773	88,76%
		Penyusunan Ensiklopedia Sastra	700.777.000	621.244.831	88,65%

**Realisasi Anggaran Per-Komponen Balai/Kantor di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Output	Sub Output	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
		Revitalisasi Sastra	1.440.710.000	1.328.313.092	92,20%
Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tanpa Suboutput	Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional	9.268.747.000	7.724.240.163	83,34%
		Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional	1.786.343.000	1.192.339.750	66,75%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tanpa Suboutput	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	499.748.000	376.605.044	75,36%
		Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	4.562.985.000	3.819.578.357	83,71%
		Pengelolaan kepegawaian	4.692.115.000	4.110.835.150	87,61%
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1.058.048.000	858.018.182	81,09%
		Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	835.562.000	525.753.015	62,92%
Layanan Perkantoran	Tanpa Suboutput	Gaji dan Tunjangan	73.615.220.000	62.926.562.322	85,48%
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	28.056.052.000	24.000.062.887	85,54%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tanpa Suboutput	Gedung dan Bangunan	382.600.000	380.595.600	99,48%
		Pengadaan Kendaraan Bermotor	6.253.003.000	5.208.014.000	83,29%
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	3.138.912.000	2.966.691.198	94,51%
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	1.422.438.000	1.109.949.754	78,03%
Total			187.045.027.000	158.047.964.250	84,50%


PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu laporan kinerja Badan Bahasa untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Bahasa.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 9 Februari 2021

  
Ratna Perwitasari  
NIP. .... 198306292008012004

No.	Pernyataan		Check-list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting unit kerja</li> <li>2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya</li> </ol>	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah SMART	✓

III.7 Data perbandingan tahun sebelumnya tidak ada karena masa renstra baru 2020-2024. Perbandingan dengan target akhir renstra 2024.

### NILAI SETIAP VARIABEL KINERJA ANGGARAN SATKER

No	Satker	Capaian Output	Penyerapan	Konsistensi	Efisiensi	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	100,0	94,1	39,1	5,9	78,2	89,9	82,9
2	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	96,0	78,1	97,0	20,0	95,6	91,7	94,0
3	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	99,7	80,6	95,3	20,0	97,2	95,1	96,4
4	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	100,0	94,7	98,6	9,4	91,7	98,8	94,5
5	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	100,0	96,3	62,0	20,0	92,7	97,3	94,6
6	BALAI BAHASA BALI	100,0	88,4	70,3	20,0	93,5	99,0	95,7
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	100,0	91,2	87,0	8,8	88,8	97,5	92,3
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	100,0	97,6	40,1	20,0	88,9	98,7	92,8
9	BALAI BAHASA PAPUA	100,0	88,6	15,9	12,9	78,5	93,5	84,5
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	100,0	95,5	89,8	20,0	97,7	98,6	98,1
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	100,0	95,0	99,2	5,0	88,6	98,6	92,6
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	100,0	98,6	98,7	2,1	86,8	99,7	92,0
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	100,0	92,9	72,1	11,3	88,0	98,0	92,0
14	BALAI BAHASA RIAU	100,0	99,3	74,9	8,1	86,9	98,3	91,4
15	BALAI BAHASA ACEH	100,0	92,0	76,0	13,8	90,4	97,0	93,0
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	100,0	91,6	71,9	20,0	94,1	93,6	93,9
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	94,4	90,6	63,2	20,0	90,0	99,0	93,6
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	96,2	91,9	88,0	7,7	86,6	98,7	91,4
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	100,0	99,6	95,3	7,4	90,1	98,5	93,5
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	100,0	86,8	72,6	20,0	93,7	89,1	91,9
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	100,0	93,6	90,0	6,4	87,9	81,2	85,2
22	KANTOR BAHASA JAMBI	100,0	94,3	99,3	20,0	99,3	92,4	96,5
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	100,0	97,4	97,8	20,0	99,3	85,3	93,7
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	100,0	98,0	88,6	8,0	89,1	100,0	93,5
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	100,0	95,6	98,6	20,0	99,3	88,4	94,9
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	100,0	96,1	88,7	8,5	89,3	98,7	93,1
27	KANTOR BAHASA BENGKULU	100,0	91,3	95,4	16,4	95,8	96,0	95,9
28	KANTOR BAHASA BANTEN	100,0	98,1	85,8	3,6	85,5	99,1	90,9
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	100,0	95,5	93,8	10,8	91,8	97,8	94,2
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	100,0	93,2	97,6	11,0	92,5	100,0	95,5
31	KANTOR BAHASA MALUKU	100,0	97,5	99,5	20,0	99,7	98,3	99,1
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	100,0	93,6	90,4	14,7	93,9	99,1	96,0
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	100,0	98,5	20,4	20,0	85,4	96,5	89,8

## NILAI SETIAP VARIABEL PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER

No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Penyampaian Data Kontrak	Ketertiban Pengelolaan Uang Persediaan	LPJ Bendahara	Retur SP2D	Realisasi Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Perencanaan Kas	Kesalahan SPM	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai IKPA
1	SEKRETARIAT BADAN BAHASA	1	12,0	99,9	92,5	66,7	83,0	99,3	95,1	95,7	0,0	80,0	100,0	83,3	89,9
2	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	81,9	100,0	100,0	90,9	83,0	100,0	73,3	100,0	0,0	85,0	100,0	92,9	91,7
3	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,7	100,0	0,0	80,0	100,0	97,2	95,1
4	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	96,7	100,0	0,0	90,0	100,0	100,0	98,8
5	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	71,9	93,6	100,0	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	96,7	97,3
6	BALAI BAHASA BALI	1	82,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,0
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	90,6	100,0	0,0	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	97,5
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	71,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	85,0	100,0	100,0	98,7
9	BALAI BAHASA PAPUA	1	10,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	100,0	0,0	80,0	100,0	66,7	93,5
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	51,9	97,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	100,0	98,6
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,6
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	77,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	95,0	100,0	100,0	99,7
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	73,6	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	98,3	98,0
14	BALAI BAHASA RIAU	1	74,5	100,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	98,5	98,3
15	BALAI BAHASA ACEH	1	72,9	100,0	0,0	100,0	100,0	98,2	95,5	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	97,0
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	80,5	96,3	0,0	100,0	83,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	83,3	93,6
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	71,3	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,0
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,7
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	60,3	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	93,9	98,5
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	65,5	100,0	100,0	40,0	100,0	100,0	89,0	100,0	0,0	80,0	100,0	81,8	89,1
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	1	83,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	81,2
22	KANTOR BAHASA JAMBI	1	95,5	100,0	0,0	57,1	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	92,4
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	91,8	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	77,3	85,3
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	73,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	83,3	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	56,1	88,4
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	73,8	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	85,0	100,0	100,0	98,7
27	KANTOR BAHASA BENGKULU	1	89,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	81,8	96,0
28	KANTOR BAHASA BANTEN	1	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,1
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	98,5	0,0	0,0	100,0	100,0	89,4	97,8
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	1	83,4	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
31	KANTOR BAHASA MALUKU	1	92,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,3
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,1
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	39,1	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	96,5



**CATATAN HASIL REVIU (CHR)**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENDIKBUD**  
**LAPORAN KINERJA 2020**

<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>	Tanggal Reviu: 8 s.d. 11 Februari 2021	Anggota Tim: 1. Zacky Ahmadi 2. Redha Novellea 3. Rusdiati 4. Muh Sutrisno
	Direviu: 11 Februari 2021	Ketua Tim: 1. Siti Rohimah 2. Timbul Bona Nainggolan
	Disetujui: 11 Februari 2021	Pengendali Teknis: 1. Prianto Kusumo W. 2. Sri Cahyaningsih
Unit Organisasi	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud

**Uraian Catatan Hasil Reviu**

**I. INFORMASI UMUM**

Laporan Kinerja Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Capaian Kinerja dan Anggaran (1 Januari s.d. 31 Desember 2020) sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang terdiri atas 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilaksanakan oleh 1 unit kerja Eselon II, 2 Pusat, 30 Unit Pelaksana Teknis.

Pagu Anggaran tahun 2020 senilai Rp416.162.160.000,00 (Pagu Awal PK), Pagu Revisi Akhir senilai Rp385.162.160.000,00, realisasi senilai Rp355.182.840.000,00 atau 92,22%.

**A. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENDIKBUD TAHUN 2020**

**1. TUGAS**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

**2. FUNGSI DAN TARGET KINERJA**

**a. FUNGSI:**

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 2) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. TARGET KINERJA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PENGUKURAN KINERJA  
JANUARI S.D. DESEMBER 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia	1. Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	42	65,80	156,67
		2. Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	26	27,87	107,19
2	Meningkatnya Budaya Literasi	IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	58,20	55.50	95.36
3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	0,55	0,55	100
4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancan Internasional	1. Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	30	30	100
		2. Jumlah Pemelajar BIPA	75.865	79.705	105,06
5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas	1. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	BB	BB	100
		2. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2	1	50

**B. TARGET TIDAK TERCAPAI:**

Terdapat dua target yang tidak tercapai pada Sasaran Program yaitu:

1. SP 2, IKP Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target 58,20 realisasi 55,50).
2. SP 5, IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM dengan target 2 satker realisasi 1 satker (50%).

**II. HASIL REVIU**

**A. Catatan Hasil Reviu**

1. Cover Laporan  
Dokumen *dummy* Laporan Kinerja 2020 yang disampaikan belum terdapat sampul laporan.
2. Ikhtisar Eksekutif
  - a. Permasalahan/kendala dan upaya penyelesaiannya sebaiknya disajikan secara ringkas dengan format disandingkan/diletakkan sejajar agar terlihat sesuai antara permasalahan/kendala dengan upaya penyelesaian.
  - b. Hambatan pada indikator Sasaran Program 1: Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia, Indikator Kinerja Program 1: Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji, jumlahnya hanya satu, sebaiknya kalimatnya disambung saja tidak menggunakan kata “sebagai berikut”.
  - c. Dalam ringkasan eksekutif dan batang tubuh (isi) jumlah IKP tertulis 9 (sembilan).
  - d. Belum memuat klausul pemberian penghargaan atas keberhasilan capaian kinerja dan/atau sanksi terkait kegagalan pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bab I : Pendahuluan
  - a. Penulisan Huruf, Kata, dan Spasi disesuaikan dengan kaidah penulisan dan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - b. Hirarki atau urutan penulisan Dasar Hukum agar disesuaikan.
  - c. Duplikasi Dasar Hukum nomor urut 15 dan 17.
  - d. Penulisan Nomenklatur Organisasi atau Lembaga agar lengkap dan konsisten.
4. Bab II : Perencanaan Kinerja
  - a. Tabel 2 untuk penulisan target kinerja IKP 4.2 belum konsisten menggunakan tanda baca titik (.) sebagai pemisah angka ribuan.
  - b. Target tujuan strategis dalam Tabel 2 belum mencantumkan satuan target.
5. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
  - a. SP 2 IKP 2.1 target dalam Perjanjian Kinerja dan Bab II tertulis nilai indeks 58,2 sedangkan dalam Ringkasan Eksekutif dan Bab III tertulis 55,50.
  - b. SP 2 IKP 2.1 terdapat kendala “tidak semua penerbit yang mendaftar seleksi sudah memiliki hak terjemahan dengan penerbit luar negeri” namun upaya untuk mengatasi kendala tersebut belum ada. Untuk itu agar ditambahkan upaya “melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penerbitan buku” sehingga narasi strategi yang dilakukan dst. sebaiknya dihapus karena sudah termasuk dalam ruang lingkup langkah antisipasi.
  - c. SP 3 IKP 3.1 terdapat kendala “kurang optimalnya koordinasi antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah” namun upaya untuk mengatasi kendala tersebut belum ada.
  - d. Warna grafis keterangan target IKP 1.1 sampai dengan IKP 4.2 berwarna biru, tidak konsisten dengan warna grafis diagram batangnya.
  - e. SP 5 IKP 5.1 target dalam Perjanjian Kinerja, Bab II, dan Bab III adalah predikat BB namun dalam grafis menggunakan nilai angka, sebaiknya agar konsisten menggunakan nilai predikat. Nilai angka dasar (tahun 2019) dengan grafis juga penulisan nilainya belum konsisten.
  - f. SP 5 IKP 5.1 untuk upaya yang dilakukan belum sinkron dengan kendala yang telah dijelaskan sebelumnya.
  - g. Dalam poin efisiensi anggaran belum terdapat tabel yang menyampaikan anggaran sebelum dilakukan efisiensi dan sesudah efisiensi serta nilai efisiensi anggaran yang telah dilakukan.
  - h. Pada Tabel 14, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan masih tertulis sebagai Unit/Pusat/Struktur Organisasi.
6. Bab IV : Penutup
  - a. Jumlah IKP yang mencapai realisasi <100%, 100%, dan >100% tidak sama dengan yang dijelaskan pada Bab III.
  - b. Terdapat kalimat yang tidak efektif yaitu “BPP Bahasa untuk terus meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran”.
  - c. Terdapat kalimat yang menyebutkan “pada tahun 2019, BPP Bahasa mampu menyerap anggaran lebih dari 91,61%”. Tahun agar disesuaikan dan kata “lebih dari” sebaiknya dihapus karena menyatakan ketidakpastian.
  - d. Grafis diagram yang disajikan kurang informatif dalam menggambarkan narasi paragraf tentang realisasi anggaran dan persentase daya serap.

## **B. Standar Laporan Kinerja Tahun 2020 (Format)**

1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP).  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah menampilkan data indikator program, visi dan misi.

2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah menyajikan target kinerja.
3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah (IP) yang memadai.  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program .
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah melampirkan capaian kinerja.
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan .  
Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

### C. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud **telah** disusun oleh unit kerja yang melakukan tugas dan fungsinya.
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja **telah** didukung dengan data yang memadai.
3. Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 **telah** menyajikan data yang akurat.
4. **Telah** terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari 1 Unit Eselon 2, 2 Pusat dan 30 UPT di lingkungan BPP Bahasa Kemendikbud.
5. **Telah** ada penanggung jawab dalam pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja yang **telah** ditetapkan berdasarkan SK. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan oleh 1 Unit Eselon 2, 2 Pusat, 30 UPT dengan berkoordinasi dengan tim penyusun LAKIN BPP Bahasa Kemendikbud.
6. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja yang disampaikan **telah** diyakini keandalannya.
7. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja **telah** diketahui oleh unit kerja terkait.
8. Laporan Kinerja BPP Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 **merupakan gabungan partisipasi** dari 1 Unit Eselon 2, 2 Pusat dan 30 UPT.
9. LAKIN **telah** memuat informasi mengenai :
  - 1) Ringkasan Eksekutif
  - 2) Bab I Pendahuluan
  - 3) Bab II Perencanaan Kinerja
  - 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - 5) Bab IV Penutup
10. LAKIN **belum** dilengkapi dengan Daftar Grafik (nomor grafik, nama grafik dan nomor halaman)

### D. Subtansi Laporan Kinerja Tahun 2020

1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** selaras dengan rencana strategis
3. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja
4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja **telah** sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama
5. **Telah** terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu (tahun 2019)
6. IKU dan IK **telah** cukup mengukur tujuan/sasaran
7. IKU dan IK **telah** *Spesific Measurable Achievable Realistic Timely* (SMART)

**Koreksi/Perbaikan:**

Kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud agar:

1. Menyempurnakan Laporan Kinerja Tahun 2020 sesuai Petunjuk Teknis Permenpan & Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.
2. Menjadi perhatian pada IKP yang tidak mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk capaian kinerja.
3. Memberi apresiasi kepada unit kerja yang realisasi capaian kinerjanya > 100% melebihi target Perjanjian Kinerja.
4. Memerintahkan kepada Tim Penyusun LAKIN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 agar:  
Memperbaiki/mengoreksi *Dummy* LAKIN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Tahun 2020 sesuai dengan Catatan Hasil Reviu APIP.

Mengetahui/Menyetujui:  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa,



Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D  
NIP196711161992031001

Jakarta, 11 Februari 2020  
Pengendali Mutu,



Indah Setiawati  
NIP196209141986022001

## **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,  
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

